

**ANALISIS PERBANDINGAN DAN PREDIKSI PENDAPATAN PAJAK
DAERAH**

Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara

Skripsi

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi**



Oleh:

Lorita Naisali

NIM : 052114048

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA**

2010

**ANALISIS PERBANDINGAN DAN PREDIKSI PENDAPATAN PAJAK
DAERAH**

Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara

Skripsi

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi**



Oleh:

Lorita Naisali

NIM : 052114048

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA**

2010

Skripsi

**ANALISIS PERBANDINGAN DAN PREDIKSI PENDAPATAN PAJAK
DAERAH**

Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara



Pembimbing I

Firma Sulistiyowati, S.E., M.Si., QIA

Tanggal: 26 Agustus 2010

Skripsi

**ANALISIS PERBANDINGAN DAN PREDIKSI PENDAPATAN PAJAK
DAERAH**

Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara

Dipersiapkan dan ditulis oleh:

Lorita Naisali
NIM: 0521114048

Telah dipertahankan didepan Dewan Penguji
Pada Tanggal 30 September 2010 dan dinyatakan memenuhi syarat

Susunan Dewan Penguji

Nama Lengkap

Tanda Tangan

Ketua Dra. YFM. Gien Agustinawansari, M.M., Akt

Sekretaris Lisia Apriani, S.E., M.Si., Akt., QIA

Anggota Firma Sulistiyowati, S.E., M.Si., QIA

Anggota Drs. Y.P. Supardiyono, M.Si., Akt., QIA

Anggota Drs. Yusef Widya Karsana, M.Si., Akt., QIA



Yogyakarta, 30 September 2010

Fakultas Ekonomi
Universitas Sastra Dharma
Dekan



Drs. Y.P. Supardiyono, M.Si., Akt., QIA

MOTÖ DAN PERSEMBAHAN

Perisai bagiku adalah

Allah, yang menyelamatkan orang-orang yang tulus hati.

(Mazmur 7:11)

Untuk bisa sungguh-sungguh hidup anda harus menghidupi hari ini. Sebab hidup adalah singkat dan berakhir begitu cepat. Bila anda tidak menghidupi hari ini, anda akan kehilangan hari ini dan jangan tenggelam dalam hari kemarin atau hari esok tetapi hidupilah hari ini. "Carpe Diem"

(Phil Bosmans)

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

- Tuhan Yesus, Bunda Maria Pelindung dan Penyelamat jiwaku
 - Bapak Usi dan Mama Usi tersayang
 - Bapak dan Mama tercinta
 - Bapak Kolo dan Mama Abi (Almh.) tersayang
- Kakak-kakak tersayang: Serilla & Johanes, Evy & Hemus
 - Adik-adikku tersayang: Melly, Tere (Ningsih), Putra
 - Anggi, Virginia dan Martino (Ma Loli sayang kalian)



UNIVERSITAS SANATA DHARMA
FAKULTAS EKONOMI
JURUSAN AKUNTANSI – PROGRAM STUDI AKUNTANSI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul: **ANALISIS PERBANDINGAN DAN PREDIKSI PENDAPATAN PAJAK DAERAH**, Studi kasus pada Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara dan dimajukan untuk diuji pada tanggal 30 September 2010 adalah hasil karya saya.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin, atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain yang saya aku seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut di atas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya ternyata melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Yogyakarta, 30 September 2010
Yang membuat pernyataan,

(Lorita Naisali)

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya mahasiswa Universitas Sanata Dharma:

Nama : Lorita Naisali

Nomor Mahasiswa : 052114048

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma karya ilmiah saya yang berjudul: "ANALISIS PERBANDINGAN DAN PREDIKSI PENDAPATAN PAJAK DAERAH" Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara, beserta perangkat yang diperlukan (bila ada).

Dengan demikian saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin kepada saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Yogyakarta
Pada tanggal 30 september 2010
Yang menyatakan



(Lorita Naisali)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan Kehadirat Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang atas semua berkat dan rahmat pertolonganNya, maka penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis mendapat bantuan, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Rama Dr. Ir. P. Wiryono Priyotamtama, S.J, selaku Rektor Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
2. Drs. YP. Supardiono, M.Si., Akt., QIA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
3. Drs. Yusef Widya Karsana, M.Si., Akt., QIA, selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
4. Firma Sulistiyowati, S.E., M.Si., QIA, sebagai dosen pembimbing yang telah mengarahkan dan membimbing serta memberikan banyak masukan yang bermanfaat bagi penulis dalam penyusunan skripsi ini.

5. Drs. Gabriel Manek, M.Si, selaku Bupati Timor Tengah Utara yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara.
6. Bapak Maxi Akoit dan rekan-rekan, untuk bimbingan dan kesempatan yang diberikan kepada penulis selama melakukan penelitian di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten TTU.
7. Para Dosen dan Karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta yang telah membantu hingga penulis menyelesaikan studi.
8. Teman-teman MPT 2009, atas masukan-masukannya.
9. Rekan-rekan Akuntansi 05'A, yang karena telah banyak memberikan pelajaran berharga buat saya.
10. Sahabat sepanjang masa: Ole Ingrid & Berto, Tata Ita & k Louis dan Unu Ruben.
11. Mathias_Metchu “amo te”, untuk cinta dan dukungannya yang begitu besar meskipun beda pulau. *Au nek ko tala na bal bal*
12. Teman-teman terbaik saya: K Tilda, Mb Indri, Putri, Nophe (makasih untuk printernya), Ika Charo, Emi Didoek, yang sudah bersedia menjadi teman saya selama dijogja, dan Nina Cunino adek saya,. Silvia Lay teman seperjuangan dan

senasib saya, thanks sista buat nasihat, saran, kritik dan doanya, laptop dan printernya juga buwww.....

13. Teman-teman kost Menur 15: Ela, Sari, Martha, Tina, Evin, Lina dan Lia, atas bantuan doanya.
14. Anak-anak IKTTU Jogjakarta;”*nek mese an sao mese tafen pah TTU*”
15. Keluarga besar Naisali dan Ahoinnai, atas doa dan dukungannya.
16. Semua pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini namun tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran. Akhir kata penulis berharap skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak yang menggunakannya.

Yogyakarta, 30 September 2010

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS.....	v
HALAMAN LEMBAR PUBLIKASI.....	vi
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	vii
HALAMAN DAFTAR ISI	x
HALAMAN DAFTAR TABEL	xii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	2
C. Batasan Masalah	3
D. Tujuan Penelitian	3
E. Manfaat Penelitian	3
F. Sistematika Penulisan	4
BAB II LANDASAN TEORI.....	6
A. Sumber Penerimaan Daerah.....	6
B. Pajak.....	9
C. Pajak Daerah	11
D. Angka Indeks	25

BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Jenis Penelitian.....	33
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	33
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	33
D. Data yang Diperlukan	34
E. Teknik Pengumpulan Data.....	34
F. Teknik Analisis Data.....	34
BAB IV GAMBARAN UMUM KABUPATEN TTU	38
A. Sejarah Singkat Kabupaten TTU	38
B. Keadaan Geografis	47
C. Penduduk dan Tenaga Kerja	49
D. Sosial.....	54
E. Sumber Daya Alam.....	57
F. Perindustrian dan Perdagangan.....	60
BAB V ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN	62
A. Analisis Data.....	62
B. Pembahasan.....	72
BAB VI PENUTUP	76
A. Kesimpulan	76
B. Keterbatasan Penelitian.....	77
C. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN	82

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1: Subjek Pajak dan Wajib Pajak Untuk Pajak Daerah Kabupaten/Kota	23
Tabel 4.1: Kecamatan dan Ibukota Kecamatan, serta Jumlah Desa/Kelurahan tiap-tiap Kecamatan Tahun 2008	46
Tabel 4.2: Jumlah Penduduk, Rumah Tangga, Luas Wilayah, Kepadatan Penduduk, dan Kepadatan Rumah Tangga menurut Kecamatan Di Kabupaten TTU Tahun 2008	50
Tabel 4.3: Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas menurut Kegiatan Seminggu yang lalu di Kabupaten TTU tahun 2008.....	53
Tabel 4.4: Banyaknya Sekolah, Guru dan Murid menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten TTU Tahun 2008	54
Tabel 4.5: Jumlah Sarana Kesehatan di Kabupaten TTU Tahun 2008	55
Tabel 4.6: Urutan Jumlah Pemeluk Agama di Kabupaten TTU Tahun 2008	56
Tabel 4.7: Populasi Ternak menurut Jenis Ternak di Kabupaten TTU Tahun 2006- 2008 (Ekor).....	59
Tabel 5.1: Realisasi Pajak Daerah dalam PAD Kabupaten TTU Tahun 2003- 2008 (Dalam Rupiah)	63
Tabel 5.2: Angka Indeks Berantai Pajak Daerah Kabupaten TTU tahun anggaran 2003-2008.....	66
Tabel 5.3: Perhitungan Trend Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten TTU Tahun 2003- 2008	68
Tabel 5.4: Jarak Tahun yang akan Diprediksi dengan Tahun Tengah (Nilai X)	70

Tabel 5.5: Angka Indeks Berantai Pajak Daerah Kabupaten TTU tahun anggaran 2003-2008.....	73
Tabel 5.6: Hasil Perhitungan Prediksi Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten TTU Tahun Anggaran 2009- 2014 (Dalam Rupiah).....	75

ABSTRAK

ANALISIS PERBANDINGAN DAN PREDIKSI PENDAPATAN PAJAK DAERAH

Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara

Lorita Naisali

NIM: 052114048

Universitas Sanata Dharma

Yogyakarta

2010

Tujuan penelitian ini adalah untuk: (1) mengetahui perbandingan pendapatan pajak daerah tahun anggaran 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007, dan 2007/2008, (2) meramalkan atau memprediksi pendapatan pajak daerah tahun anggaran 2009-2014.

Jenis penelitian ini adalah studi kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah: (1) analisis angka indeks berantai digunakan, untuk mengetahui perbandingan pendapatan pajak daerah pada tahun 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007, dan 2007/2008 (2) analisis trend dengan metode kuadrat terkecil (Least Square Method) digunakan untuk meramalkan pendapatan pajak daerah tahun 2009-2014.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan, diperoleh hasil sebagai berikut: (1) pendapatan pajak daerah pada tahun 2004 menurun dan kembali meningkat pada tahun 2005-2008. Pada tahun 2004 angka indeks pajak daerah menurun sebesar 12% dari tahun 2003, sedangkan pada tahun 2005 – 2008 angka indeks pajak daerah terus meningkat sebesar 125%, 114%, 121% dan 111%. (2) Prediksi pendapatan pajak daerah tahun 2009-2014 menunjukkan peningkatan pada setiap tahun. Pada Tahun 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, dan 2014 pendapatan pajak daerah diprediksikan sebesar Rp 1.074.842.374, Rp 1.168.414.008, Rp 1.261.985.643, Rp 1.355.557.279, Rp 1.449.128.913, dan Rp 1.542.700.548.

ABSTRACT

COMPARISON ANALYSIS AND THE PREDICTION ON REGIONAL INCOME TAX A Case Study in Regency Government of Timor Tengah Utara

Lorita Naisali
052114048
Sanata Dharma University
Yogyakarta
2010

This study intended to: (1) find out the comparison of regional income tax for fiscal year of 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007, and 2007/2008, (2) predict the regional income tax for fiscal year of 2009-2014.

The type of this research was case study. The data collecting techniques applied in this research were interview and documentation methods. Whereas the data analysis techniques used were: (1) Analysis of Chain Index Number to know the comparison of regional income tax in 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007, and 2007/2008, (2) Analysis of Trend with Least Square Method to predict the regional income tax in 2009-2014.

Based on the research and data analysis, the results were: (1) The regional income tax decreased in 2004 and increased in 2005-2008. The index number of regional income tax in 2004 decreased 12% since 2003, while the index numbers of regional tax increased in 2005-2008 which were 125%, 114%, 121% and 111%, respectively. (2) The prediction of regional income tax in 2009-2014 showed an increase every year. The prediction of the regional income tax in 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 and 2014 were Rp 1,074,842,374; Rp 1,168,414,008; Rp 1,261,985,643; Rp 1,355,557,279; Rp 1,449,128,913; Rp 1,542,700,548, respectively.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada tahun 2001 diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, pemerintah melaksanakan otonomi daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintah yang efisien, efektif, dan bertanggungjawab, yang kemudian diganti dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 karena dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan penyelenggaraan otonomi yang lebih efisien (Nordiawan, 2006: 9-10).

Pembangunan daerah adalah suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada dan didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan (*endogenous development*) dengan menggunakan potensi sumberdaya manusia, kelembagaan dan sumberdaya fisik secara lokal, sehingga terciptalah lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut (Arsyad, 2004: 298). Pembangunan daerah diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya dalam meningkatkan dayaguna potensi daerah secara optimal dan terpadu.

Pembangunan daerah tidak terlepas dari sumber-sumber penerimaan daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sumber-sumber pembiayaan

pembangunan daerah diharapkan bertumpu pada penerimaan dari daerah itu, sedangkan penerimaan dari luar hanya sebagai pelengkap.

Sumber penerimaan daerah terdiri dari Pendapatan Daerah dan Pembiayaan. Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Pembiayaan bersumber dari Sisa lebih perhitungan anggaran daerah, Pinjaman daerah, Dana cadangan daerah dan Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah berasal dari pos pajak daerah. Pajak daerah adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah (baik pemerintah daerah Tk.I, maupun pemerintah daerah Tk.II) dan hasil dipergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan daerah yang termuat dalam APBD (Marsyahrul, 2005: 5). Pendapatan Asli Daerah dari pos pajak daerah tidak akan sama setiap tahunnya, artinya kadang pendapatan mengalami peningkatan atau mengalami penurunan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perbandingan pendapatan pajak daerah Kabupaten Timor Tengah Utara pada tahun anggaran 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007, dan 2007/2008 ?
2. Bagaimana prediksi pendapatan pajak daerah Kabupaten Timor Tengah Utara selama tahun anggaran 2009 – 2014?

C. Batasan Masalah

Penulis pada penulisan ini membatasi penelitian pada sumber-sumber pendapatan pajak daerah kabupaten/kota yang berasal dari: pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan dan pajak pengambilan bahan galian golongan C.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perbandingan pendapatan pajak daerah Kabupaten Timor Tengah Utara pada tahun anggaran 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007, dan 2007/2008.
2. Untuk meramalkan atau memprediksi pendapatan pajak daerah Kabupaten Timor Tengah Utara selama tahun anggaran 2009-2014.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi Pemerintah Kabupaten
Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumber informasi dan sebagai bahan evaluasi dalam perencanaan anggaran dan kebijakan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten.
2. Bagi Universitas
Hasil penelitian ini dapat menambah bahan pustaka yang berguna sebagai tambahan bahan bacaan dan pengetahuan bagi pembaca.

3. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai tambahan bahan bacaan dan pengetahuan bagi pembaca yang tertarik dengan topik pajak daerah dan juga sebagai sumber informasi bagi pembaca yang ingin mengetahui perbandingan pajak daerah suatu Kabupaten.

4. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini berguna sebagai sumber pengetahuan dan memperdalam pemahaman penulis mengenai pajak daerah.

F. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori

Dalam bab ini dijelaskan mengenai hasil tinjauan pustaka yang relevan dengan permasalahan yang diangkat.

Bab III Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan mengenai jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, data yang diperlukan, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV Gambaran Umum Kabupaten Timor Tengah Utara

Bab ini menyajikan gambaran umum Kabupaten Timor Tengah Utara berdasarkan letak geografis, sosial, penduduk, pertanian, industri, transportasi dan komunikasi serta keuangan dan perdagangan.

Bab V Analisis Data dan Pembahasan

Bab ini membahas tentang proses pengolahan data menggunakan teknik analisis data yang telah ditentukan sebelumnya, serta pembahasannya.

Bab VI Penutup

Dalam bab ini diuraikan tentang kesimpulan, saran, dan keterbatasan penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Sumber Penerimaan Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, Penerimaan Daerah terdiri dari Pendapatan Daerah dan Pembiayaan Daerah. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran yang akan datang. Pendapatan daerah bersumber dari:

1. Pendapatan Asli Daerah

Soeratno (2002: 13-21) mengatakan bahwa pendapatan asli daerah merupakan Pendapatan Asli Daerah sendiri yang dikelola oleh pemerintah daerah yang bersangkutan. Sumber pendapatan asli daerah terdiri dari:

- a) Pajak daerah
- b) Retribusi daerah
- c) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
- d) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, meliputi:
 - 1) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
 - 2) Jasa giro

- 3) Pendapatan bunga
- 4) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- 5) Komisi, potongan atau bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

2. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan adalah dana yang berasal dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Perimbangan terdiri dari:

1) Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil adalah dana yang berasal dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka presentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dana Bagi Hasil bersumber dari pajak dan sumber daya alam.

- a) Dana Bagi Hasil yang bersumber dari pajak terdiri dari: Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Penghasilan (PPh)
- b) Dana Bagi Hasil yang bersumber dari sumber daya alam terdiri dari: Kehutanan, Pertambangan umum, Perikanan, Pertambangan minyak bumi, Pertambangan gas bumi, dan Pertambangan panas bumi.

2) Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26 % dari Pendapatan Dalam Negeri Neto yang ditetapkan dalam APBN. Proporsi DAU antara daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota ditetapkan berdasarkan imbangannya antara Propinsi dan Kabupaten/Kota.

3) Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

3. Lain-lain Pendapatan

Lain-lain Pendapatan terdiri atas hibah dan Pendapatan Dana Darurat. Pemerintah mengalokasikan Dana Darurat yang berasal dari APBN untuk keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana nasional dan/atau peristiwa luar biasa yang tidak dapat ditanggulangi oleh Daerah dengan menggunakan sumber APBD.

Pembiayaan daerah meliputi:

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran daerah

- b. Dana cadangan daerah
- c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
- d. Pinjaman daerah

Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali. Pinjaman Daerah bersumber dari: Pemerintah, Pemerintah Daerah lain, Lembaga keuangan Bank dan Lembaga keuangan bukan Bank serta masyarakat.

B. Pajak

1. Pengertian Pajak

Waluyo (2008) dalam Adriani (1991: 2).

“Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.”

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pajak adalah sebagai berikut:

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
2. Jasa timbal tidak ditunjukkan secara langsung.
3. Pajak dipungut oleh Negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah.
5. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain *budgeter*, yaitu mengatur.

2. Fungsi Pajak

1) Fungsi penerimaan (*Budgeter*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Contohnya: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan Negara.

2) Fungsi mengatur (*Reguler*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang sosial dan ekonomi.

3. Sistem Pemungutan Pajak

1. *Self Assessment system*

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

2. *Official Assessment system*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

3. *Withholding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak

4. Tarif Pajak

1) Tarif proporsional

Tarif proporsional adalah tarif pajak dengan presentase tetap (tidak berubah).

2) Tarif progresif

Tarif progresif adalah tarif pajak dengan presentase semakin besar bila dasar pengenaan pajaknya semakin besar.

3) Tarif degresif

Tarif degresif adalah tarif pajak dengan presentase semakin menurun bila dasar pengenaan pajaknya bertambah besar.

4) Tarif Tetap

Tarif tetap adalah tarif dengan jumlah nominal yang tetap tidak tergantung dengan nilai objek pajak yang dikenakan pajak.

C. Pajak Daerah

1. Pengertian Pajak Daerah

Pengertian pajak daerah menurut Marsyahrul (2005: 5):

“Pajak Daerah adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah (baik pemerintah daerah Tk.I, maupun pemerintah daerah Tk.II) dan hasilnya dipergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan daerah (APBD).”

Pengertian Pajak Daerah menurut Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah:

“Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundangan yang

berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah.”

2. Dasar Hukum

- 1) Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan penyempurnaan dari UU No.18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah

3. Jenis Pajak Daerah

Berdasarkan UU Nomor 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pajak daerah dibagi menjadi dua yaitu pajak propinsi dan pajak kabupaten/kota.

1) Pajak Daerah Propinsi, meliputi:

a) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air

Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air. Objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Objek pajak kendaraan di atas air adalah kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan di atas air. Subjek pajak kendaran bermotor dan kendaraan di atas air adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air. Wajib pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor dan kendaraan di atas

air. Tarif pajak kendaraan di atas air ditetapkan sebesar 1,5%.

Tarif pajak kendaraan bermotor ditetapkan sebesar:

- (1) 1,5% (satu koma lima persen) untuk kendaraan bermotor bukan umum.
- (2) 1% (satu persen) untuk kendaraan bermotor umum
- (3) 0,5% (nol koma lima persen) untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.

b) **Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air**

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. Subjek pajak bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas adalah orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air. Wajib pajak bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air adalah orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air. Objek pajak bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air adalah penyerahan kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air.

c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas bahan bakar yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di atas air. Subjek pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah konsumen bahan bakar kendaraan bermotor. Wajib pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan bahan bakar kendaraan bermotor. Pemungutan pajak bahan bakar kendaraan bermotor dilakukan oleh penyedia bahan bakar kendaraan bermotor. Tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor ditetapkan sebesar 5%. Objek pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah bahan bakar kendaraan bermotor yang disediakan untuk atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di atas air.

d) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan

Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan/atau air permukaan untuk digunakan bagi orang pribadi atau badan, kecuali untuk keperluan dasar rumah tangga dan pertanian rakyat. Subjek pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan adalah orang

pribadi atau badan yang mengambil, atau memanfaatkan, atau mengambil dan memanfaatkan air bawah tanah dan atau air permukaan. Wajib pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan adalah orang pribadi atau badan yang mengambil, atau memanfaatkan, atau mengambil dan memanfaatkan air bawah tanah dan atau air permukaan. Tarif pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah sebesar 20% dan sebesar 10% untuk air permukaan. Objek pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan adalah:

- (1) Pengambilan air bawah tanah dan atau air permukaan
- (2) Pemanfaatan air bawah tanah dan atau air permukaan
- (3) Pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan atau air permukaan.

2) Pajak Daerah Kabupaten/Kota, terdiri atas:

a) Pajak Hotel

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan/atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran. Objek Pajak Hotel

adalah pelayanan yang disediakan hotel dengan pembayaran, termasuk:

- (1) Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek.
- (2) Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan.
- (3) Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel, bukan untuk umum.
- (4) Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel.

Tidak termasuk sebagai objek pajak hotel adalah:

- (1) Penyewaan rumah atau kamar, apartemen dan/atau fasilitas tempat tinggal lainnya yang tidak menyatu dengan hotel
- (2) Pelayanan tinggal di asrama dan pondok pesantren
- (3) Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan di hotel yang dipergunakan oleh bukan tamu hotel dengan pembayaran
- (4) Pertokoan, perkantoran, perbankan, salon yang dipergunakan oleh umum di hotel.
- (5) Pelayanan perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel dan dapat dimanfaatkan oleh umum.

b) Pajak Restoran

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan restoran. Restoran adalah tempat menyantap makanan dan/atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga atau *catering*. Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan restoran dengan pembayaran. Tidak termasuk objek pajak restoran adalah:

- (1) Pelayanan usaha jasa boga atau catering
- (2) Pelayanan yang disediakan oleh restoran atau rumah makan yang peredarannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

c) Pajak Hiburan

Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis pertunjukkan, permainan, permainan ketangkasan, dan/atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun, yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolah raga. Objek Pajak Hiburan adalah penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. Tidak termasuk objek pajak hiburan adalah penyelenggaraan hiburan yang tidak dipungut bayaran, seperti hiburan yang diselenggarakan dalam rangka pernikahan, upacara adat, kegiatan keagamaan.

d) Pajak Reklame

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah. Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame. Tidak termasuk sebagai objek pajak reklame adalah:

- (1) Penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya
- (2) Penyelenggaraan reklame lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

e) Pajak Penerangan Jalan

Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, dengan ketentuan bahwa di wilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah. Dikecualikan dari objek pajak penerangan jalan adalah:

- (1) Penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

- (2) Penggunaan listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, perwakilan asing, dan lembaga-lembaga internasional dengan asas timbal balik
 - (3) Penggunaan tenaga listrik yang berasal bukan dari PLN dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknik terkait
 - (4) Penggunaan tenaga listrik lainnya yang diatur dengan peraturan Daerah
- f) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
- Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C adalah pajak atas kegiatan pengambilan bahan galian Golongan C sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahan Galian Golongan C meliputi:
- a. Asbes
 - b. Batu tulis
 - c. Batu setengah permata
 - d. Batu kapur
 - e. Batu apung
 - f. Batu permata
 - g. Bentonit
 - h. Dolomit
 - i. Feldspar
 - j. Batu garam (*halite*)

- k. Grafit
- l. Granit/andesit
- m. Gips
- n. Kalsit
- o. Kaolin
- p. Leusit
- q. Magnesit
- r. Mika
- s. Marmer
- t. Nitrat
- u. Opsidien
- v. Oker
- w. Pasir dan kerikil
- x. Pasir kuarsa
- y. Perlit
- z. Phospat
- aa. Talk
- ab. Tanah serap (*fullers earth*)
- ac. Tanah diatome
- ad. Tanah liat
- ae. Tawas (alum)
- af. Tras
- ag. Yarosif

ah. Zeolit

ai. Basal

aj. Trakkit

Dikecualikan dari objek pajak pengambilan bahan galian golongan C adalah:

(1) kegiatan pengambilan bahan galian golongan C yang nyata-nyata tidak dimaksudkan untuk mengambil bahan galian golongan C tersebut dan tidak dimanfaatkan secara ekonomis.

(2) Pengambilan bahan galian golongan C lainnya yang diterapkan dalam Peraturan Daerah.

g) Pajak Parkir

Pajak Parkir adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran. Tidak termasuk sebagai objek pajak parkir adalah:

(1) penyelenggaraan tempat parkir oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah

- (2) penyelenggaraan parkir oleh kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing, dan perwakilan lembaga-lembaga internasional dengan asas timbal balik.
- (3) Penyelenggaraan tempat parkir lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah.

4. Kriteria Pajak Daerah

Kriteria pajak daerah, adalah:

- 1) Bersifat pajak dan bukan retribusi
- 2) Objek pajak terletak atau terdapat di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan
- 3) Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum.
- 4) Potensinya memadai. Hasil penerimaan pajak harus lebih besar dari biaya pemungutan
- 5) Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif. Pajak tidak mengganggu alokasi sumber-sumber ekonomi dan tidak merintang arus sumber daya ekonomi antar daerah maupun kegiatan ekspor-impor
- 6) Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat

- 7) Menjaga kelestarian lingkungan, yang berarti bahwa pengenaan pajak tidak memberikan peluang kepada pemda atau Pemerintah atau masyarakat luas untuk merusak lingkungan.

5. Subjek Pajak dan Wajib Pajak, Pajak Daerah Kabupaten/Kota

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak daerah, sedangkan Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungutan atau pemotongan pajak tertentu. Berikut adalah tabel Subjek Pajak dan Wajib Pajak untuk Pajak Daerah Kabupaten/Kota:

Tabel 2.1 Subjek Pajak dan Wajib Pajak untuk Pajak Daerah Kabupaten/Kota

Objek Pajak	Subjek Pajak	Wajib Pajak
Pajak Hotel	Orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada hotel	Pengusaha hotel
Pajak Restoran	Orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada restoran	Pengusaha restoran
Pajak Hiburan	Orang pribadi atau badan yang menonton dan/atau menikmati hiburan	Orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan

Tabel 2.1 (lanjutan) Subjek Pajak dan Wajib Pajak untuk Pajak Daerah Kabupaten/Kota

Objek Pajak	Subjek Pajak	Wajib Pajak
Pajak Reklame	Orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau melakukan pemasangan reklame	Orang pribadi yang menyelenggarakan reklame
Pajak Penerangan Jalan	Orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik	Orang pribadi atau badan yang menjadi pelanggan listrik dan/atau pengguna tenaga listrik
Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	Orang pribadi atau badan yang mengambil bahan galian	Orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan pengambilan bahan galian
Pajak Parkir	Orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas tempat parkir	Orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir

Sumber: Soemarso, S. Rahardjo. Perpajakan Pendekatan Komprehensif. 2007. Jakarta. Salemba empat.

6. Tarif Pajak Daerah

Besarnya tarif untuk pajak propinsi ditetapkan secara seragam di seluruh Indonesia sebagaimana diatur dalam PP Nomor 65 Tahun 2001 tentang pajak daerah. Sedangkan besarnya tarif untuk Kabupaten/Kota ditetapkan dengan peraturan daerah (Perda), namun tidak boleh lebih tinggi dari tarif maksimum yang sudah ditetapkan dalam undang-undang. Berikut adalah tarif pajak untuk Kabupaten/Kota:

- 1) Pajak Hotel 10 % (sepuluh persen)
- 2) Pajak Restoran 10 % (sepuluh persen)
- 3) Pajak Hiburan 35 % (tiga puluh lima persen)
- 4) Pajak Reklame 25% (dua puluh lima persen)
- 5) Pajak Penerangan Jalan 10 % (sepuluh persen)
- 6) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C 20 % (dua puluh persen)
- 7) Pajak Parkir 20 % (dua puluh persen)

D. Angka Indeks

1. Pengertian Angka Indeks

Angka indeks merupakan suatu angka yang dibuat sedemikian rupa sehingga dapat dipergunakan untuk membuat perbandingan tentang perkembangan suatu kegiatan dalam dua waktu yang berbeda (Supranto, 2007: 153). Angka indeks juga diartikan sebagai angka perbandingan yang perubahan relatifnya dinyatakan dalam bentuk persentase terhadap

yang lain. Di dalam membuat angka indeks diperlukan dua macam waktu, yaitu waktu dasar (*base period*) dan waktu bersangkutan atau sedang berjalan (*current period*). Waktu dasar (*base period*) adalah waktu dimana suatu kegiatan atau kejadian digunakan sebagai dasar perbandingan, sedangkan waktu yang bersangkutan (*current period*) adalah waktu dimana suatu kegiatan digunakan sebagai dasar perbandingan terhadap kegiatan pada waktu dasar. Tahun dasar dalam perhitungan angka indeks diberi nilai 100%. Ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam menentukan atau memilih tahun dasar, yakni (Boedijoewono, 2007: 173):

- a. Tahun dasar yang dipilih sebaiknya menunjukkan keadaan normal atau keadaan ekonomi yang stabil, karena tahun dasar dinilai 100%.
- b. Tahun dasar yang dipilih jangan terlalu jauh di belakang, paling lama sepuluh tahun atau lebih baik kurang dari lima tahun, sehingga tidak jauh dari tahun yang akan dihitung angka indeks.

2. Tujuan Angka Indeks

Tujuan dari pembuatan angka indeks adalah untuk:

- a. Untuk mengetahui maju-mundur atau naik-turunnya suatu usaha (perusahaan ingin mengetahui naik-turunnya hasil penjualan, pemerintah ingin mengetahui naik-turunnya penerimaan Negara, penerimaan devisa dan lain sebagainya).

- b. Tujuan pembuatan angka indeks adalah untuk mengukur secara kuantitatif terjadinya perubahan dalam dua waktu yang berlainan.
- c. Untuk membandingkan perkembangan dari satu periode ke periode lain.

3. Metode Perhitungan Angka Indeks

Berikut ini adalah beberapa metode dalam perhitungan angka indeks:

- a. Angka Indeks Sederhana atau Angka Indeks Tidak Tertimbang (*Simple atau Unweighted Index Number*).

Angka indeks sederhana atau angka indeks tidak tertimbang merupakan angka indeks yang tidak memasukkan faktor penimbang sebagai salah satu unsur perhitungan karena masing-masing objek dipandang memiliki arti yang sama. Metode ini dibagi dua, yaitu:

- 1) Bentuk Agregatif (*Agregative price*), merupakan indeks yang terdiri dari beberapa barang (kelompok barang). Indeks ini memungkinkan kita untuk melihat persoalan secara agregatif (secara makro), yaitu secara keseluruhan bukan melihat satu per satu.
- 2) Bentuk Relatif (*Relative price*), merupakan indeks yang terdiri dari satu macam barang saja.

Beberapa macam rumus yang berkaitan dengan angka indeks tidak tertimbang terdiri dari:

1) Angka Indeks Harga (*Price Number Index*).

Angka indeks ini digunakan untuk menggambarkan dan mengetahui perubahan harga komoditas dari satu periode ke periode lainnya. Di bawah ini adalah rumus angka indeks harga tidak tertimbang:

$$P_{o,n} = \frac{\sum P_n}{\sum P_o} \times 100\%$$

2) Angka Indeks Kuantitas (*Quantity Index Number*).

Angka indeks kuantitas ini pada dasarnya menunjukkan perkembangan jumlah barang atau produk dari satu kurun waktu ke kurun waktu lainnya.

$$Q_{o,n} = \frac{\sum Q_n}{\sum Q_o} \times 100\%$$

3) Angka Indeks Nilai (*Value Index Number*).

Angka indeks nilai menunjukkan perubahan nilai uang dari satu periode ke periode periode lainnya. Nilai ini dapat diperoleh dari hasil perkalian antara harga dan kuantitas.

$$V_{o,n} = \frac{\sum V_n}{\sum V_o} \times 100\%$$

b. Angka Indeks Tertimbang (*Weighted Index Number*)

Angka indeks tertimbang merupakan angka indeks yang memasukkan faktor penimbang sebagai salah satu unsur pokok

pembentukannya dan dapat bersifat subjektif. Metode ini dibagi menjadi dua, yaitu:

- 1) Angka indeks harga agregatif tertimbang

$$WI_{o,n} = \frac{\sum (P_n \times W)}{\sum (P_o \times W)} \times 100\%$$

- 2) Angka indeks harga relatif tertimbang

Angka indeks harga relatif tertimbang dirumuskan sebagai

berikut:
$$RWI_{o,n} = \frac{\sum (P_n / P_o \times 100\%) W}{\sum W}$$

- c. Angka Indeks, Terhitung Berdasar Kuantitas Barang (Santoso dan Hamdani, 2007: 175-178)

Pada penjelasan angka indeks tertimbang dikatakan bahwa faktor penimbang bisa saja bersifat subjektif, namun faktor penimbang juga bisa diberikan secara objektif atas dasar beberapa pertimbangan. Agar perhitungan nilai angka indeks yang dilakukan mampu memberikan hasil yang objektif, kuantitas atau jumlah barang merupakan faktor yang dinilai paling tepat. Adapun rumus-rumus yang digunakan adalah:

- 1) Rumus Angka Indeks Laspeyres

Angka Indeks Laspeyres menggunakan jumlah yang ada pada tahun dasar sebagai faktor penimbang indeks harga.

$$LI = \frac{\sum (P_n \times Q_0)}{\sum (P_0 \times Q_0)} \times 100\%$$

2) Rumus Angka Indeks Paasche

Angka Indeks Paasche menggunakan jumlah pada tahun tertentu yang angka indeksnya akan dihitung (*current year*) sebagai faktor penimbangnya. Rumus angka indeks Paasche

$$\text{adalah: } PI = \frac{\sum (P_n \times Q_n)}{\sum (P_0 \times Q_n)} \times 100\%$$

3) Rumus Angka Indeks Dorbisch dan Bowley

Rumus ini dikembangkan untuk menyelaraskan angka indeks laspeyres dan angka indeks paasche apabila selisih hasil perhitungannya relatif besar.

$$DBI = \frac{LI + PI}{2}$$

4) Rumus Angka Indeks Ronald Fischer

Angka indeks dirumuskan sebagai berikut:

$$RFI = \sqrt{LI \times PI}$$

RFI = Angka Indeks Ronald Fischer

LI = Angka Indeks Laspeyres

PI = Angka Indeks Paasche

5) Rumus Angka Indeks Marshall dan Edgeworth

$$MEI = \frac{\sum (Q_0 + Q_n) \times P_n}{\sum (Q_0 + Q_n) \times P_0} \times 100\%$$

6) Rumus Angka Indeks Walsh

Walsh memperkenalkan suatu rumus yang memasukkan unsure akar pangkat dua dari hasil kali jumlah pada tahun yang diperbandingkan dalam perhitungan angka indeksnya.

$$WI = \frac{\sum P_n \times \sqrt{Q_0 \times Q_n}}{\sum P_0 \times \sqrt{Q_0 \times Q_n}} \times 100\%$$

d. Angka Indeks Berantai (*Chain Index Number*)

Angka Indeks Berantai (*Chain Index Number*) adalah angka indeks yang menggunakan tahun dasar atau periode sebelumnya sebagai dasar perhitungannya (Santoso dan Hamdani, 2007: 179). Angka indeks berantai tidak memakai suatu tahun dasar atau waktu dasar yang tetap namun berdasarkan tahun atau waktu dasar yang mendahuluinya. Mengingat bahwa angka indeks berantai ini ditentukan berdasarkan tahun atau waktu dasar yang mendahuluinya, maka dari deretan indeks ini lebih mudah membuat perbandingan tentang perkembangan dari tahun ke tahun atau dari waktu ke waktu yang berurutan. Angka indeks berantai

dirumuskan sebagai berikut: $I_{t,t-1} = \frac{q_t}{q_{t-1}} \times 100\%$

Angka indeks berantai mempunyai beberapa keuntungan sebagai berikut (Boedijoewono, 2007: 194-195):

- 1) Angka indeks berantai dapat membandingkan nilai relatif sekarang dengan nilai relatif pada tahun atau periode sebelumnya.
- 2) Dengan angka indeks berantai kita mudah untuk memasukkan adanya unsur-unsur baru dan mengeluarkan unsur-unsur lama yang dianggap tidak diperlukan lagi tanpa merubah seluruh perhitungannya.
- 3) Dengan angka indeks berantai kita selalu dapat menyesuaikan faktor penimbangannya (*weight*) pada setiap keadaan yang kita inginkan.
- 4) Perhitungan angka indeks berantai ini dapat menghindarkan adanya pengaruh variasi musim.

Kelemahan angka indeks berantai adalah tidak dapat digunakan untuk mengadakan perbandingan dalam jangka panjang, karena perbandingan dalam jangka panjang dengan persentase akan menjadi kurang bermanfaat. Umumnya dalam angka indeks jika suatu tahun atau waktu angka indeksnya lebih besar dari 100, berarti nilai untuk tahun atau waktu itu lebih tinggi dari pada nilai tahun atau waktu sebelumnya, sedangkan jika angka indeks kurang dari 100, maka nilai pada tahun atau waktu itu lebih rendah daripada tahun sebelumnya. Nilai dari waktu ke waktu akan sama jika angka indeksnya tetap 100 (Sudjana, 1981: 215).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah studi kasus yaitu penelitian mengenai objek tertentu yang hasilnya merupakan gambaran yang lengkap dan pengumpulan datanya berdasarkan objek penelitian, sehingga hasil penelitian hanya berlaku bagi objek yang diteliti.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian merupakan tempat yang dipilih peneliti untuk melakukan penelitian yaitu pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara.

Waktu penelitian merupakan lamanya waktu yang dibutuhkan dalam melakukan penelitian.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan objek penelitian. Penelitian dilakukan pada Dinas Pendapatan Asli Daerah, Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara.

Objek penelitian merupakan benda berwujud yang menjadi bukti suatu keberadaan atau kejadian pada masa lalu yakni berupa data-data yang dikumpulkan melalui metode wawancara dan dokumentasi. Data yang

dikumpulkan berupa data Pendapatan Asli Daerah dari penerimaan pajak daerah untuk tahun anggaran 2003-2008.

D. Data yang diperlukan

- a. Gambaran umum Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara
- b. Total Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara tahun anggaran 2003-2008
- c. Pendapatan Asli Daerah dari pos pajak daerah selama tahun anggaran 2003-2008

E. Teknik Pengumpulan Data

- a. Metode Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang hal-hal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

- b. Metode Dokumentasi

Teknik ini dilakukan dengan mengumpulkan, mencatat data-data dari subjek yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.

F. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan teknik analisis data kuantitatif, sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui perbandingan pendapatan pajak daerah pada tahun anggaran 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007, dan 2007/2008 digunakan Analisis Angka Indeks Berantai. Angka Indeks Berantai (*Chain Index Number*) adalah angka indeks yang menggunakan tahun dasar atau periode sebelumnya sebagai dasar perhitungannya (Santoso dan Hamdani, 2007: 179). Angka indeks berantai tidak memakai suatu tahun dasar atau waktu dasar yang tetap namun berdasarkan tahun atau waktu dasar yang mendahuluinya. Mengingat bahwa angka indeks berantai ini ditentukan berdasarkan tahun atau waktu dasar yang mendahuluinya, maka dari deretan indeks ini lebih mudah membuat perbandingan tentang perkembangan dari tahun ke tahun atau dari waktu ke waktu yang berurutan. Angka indeks berantai dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Angka Indeks Pajak Daerah} = \frac{\text{Jumlah realisasi pendapatan pajak daerah tahun yang dicari}}{\text{Jumlah realisasi pendapatan pajak daerah tahun sebelumnya}} \times 100\%$$

Dengan perhitungan angka indeks berantai, akan memudahkan kita membuat perbandingan pendapatan pajak daerah pada tahun anggaran 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007, dan 2007/2008.

- b. Untuk meramalkan pendapatan pajak daerah selama tahun 2009-2014, menggunakan Analisis Trend dengan metode kuadrat terkecil (*Least Square Method*), (Suharyadi, 2007:180). Peramalan berguna bagi penyusunan rencana perusahaan dan Negara. Dengan mengetahui

kondisi masa depan dapat mendorong perusahaan maupun Negara untuk mempersiapkan segala sesuatu sedini mungkin sehingga hasil dapat dicapai secara optimal. Trend adalah suatu gerakan kecenderungan naik atau turun dalam jangka panjang yang diperoleh dari rata-rata perubahan dari waktu ke waktu dan nilainya cukup rata atau mulus (*smooth*).

Rumus garis trend dengan metode kuadrat terkecil adalah:

$$Y' = a + b X$$

Dimana:

Y' : Nilai Trend

a : Konstanta

b : Nilai kemiringan/Slope

X : Nilai periode waktu (tahun 2009 sampai 2014)

Sebelum mencari nilai Y' , nilai a dan b harus dicari terlebih dahulu, menggunakan rumus berikut ini:

$$a = \frac{\sum Y}{n}$$

$$b = \frac{\sum XY}{\sum X^2}$$

Dimana:

Y : Jumlah realisasi pendapatan pajak daerah selama tahun anggaran
2003-2008

a : Konstanta

X : Tahun tertentu

b : Nilai kemiringan/Slope

Setelah nilai a dan b diketahui, dimasukkan dalam persamaan trend untuk meramalkan jumlah pendapatan pajak daerah untuk tahun yang akan datang 2009-2014. Dimana, nilai Y' menunjukkan prediksi jumlah pendapatan pajak daerah; nilai a menunjukkan besarnya pendapatan pajak daerah pada tengah tahun dan nilai b (nilai b positif) menunjukkan jumlah kenaikan atau penurunan (nilai b negatif) pendapatan pajak daerah pertahun.

BAB IV

GAMBARAN UMUM KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

A. Sejarah Singkat Kabupaten Timor Tengah Utara

1. Masa Tahun 1915 – 1958

Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) yang terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 (Lembaran Negara Tahun 1958 No. 122) mula-mula disebut *Onderafdeeling Noord Miden Timor* semasa Pemerintahan Hindia Belanda. Berdasarkan pada BS/Gubernemen nomor 9-10 Tahun 1915 *Onderafdeeling Noord Miden Timor* meliputi gabungan tiga wilayah kerajaan/swapraja yaitu Swapraja Miomaffo, Insana dan Biboki. Pusat penyelenggaraan Pemerintahan *Onderafdeeling Noord Miden Timor* berkedudukan di Noeltoko, antara tahun 1915 – 1921, kemudian pada tahun 1922 oleh Controleur Pedemors (Pimpinan *Onderafdeeling*) memindahkan pusat penyelenggaraan Pemerintahan dari Noeltoko ke Kefamenanu.

Sesuai ketentuan Pemerintahan Hindia Belanda tentang aturan pemerintahan kerajaan yang diberlakukan bagi semua swapraja yang ada di Timor, setiap *Onderafdeeling* dipimpin oleh Controleur berkebangsaan Belanda dibantu seorang Petugas Pangreh Praja berkebangsaan Indonesia. Struktur kekuasaan yang dibentuk oleh Pemerintahan Hindia Belanda tersebut dipadukan dengan sisa-sisa pemerintahan asli sehingga mulai dari struktur kekuasaan paling tinggi sampai terendah berturut-turut: Controleur

kemudian Kepala Swapraja, membawahi Fetor, kemudian Temukung, membawahi Wakil Temukung dan Wakil Temukung membawahi Rakyat.

Berdasarkan struktur kekuasaan tersebut maka *Onderafdeeling Noord Miden Timor* membawahi 3 Wilayah Swapraja, 18 Kefetoran dan 176 Temukung.

✚ Swapraja Miomaffo (Kepala Swapraja: G. A. Kono) memiliki 8 kefetoran yang terdiri dari kefetoran Tunbaba, Manamas, Bikomi, Noemuti, Nilulat, Noeltoko, Naktimun dan Aplal.

✚ Swapraja Insana (Kepala Swapraja: L. A. N. Taolin) yang membawahi 5 kefetoran, masing-masing kefektotan Oelolok, Ainan, Maubesi, Subun dan Fafinesu.

✚ Swapraja Biboki (Kepala Swapraja: L.T. Manlea) memiliki 5 kefetoran yakni: kefetoran Ustetu, Oetasi, Bukifan, Taitoh dan Harneno.

Pada masa pendudukan Jepang pada tahun 1942, struktur kekuasaan yang telah ditetapkan oleh Pemerintahan Hindia Belanda tidak diubah namun yang berubah adalah nama daerah pemerintahan dan jabatannya. *Onderafdeeling* diubah menjadi *Bunken* yang dipimpin oleh seorang *Bunken Kanrikan*. Sedangkan struktur pemerintahan asli dibawah *Bunken Kanrikan* mulai dari Kepala Swapraja sampai Wakil Temukung tetap dipertahankan.

Setelah Jepang menyerah pada Sekutu dan Indonesia memproklamkan kemerdekaan, Raja-raja (Kepala Swapraja) seluruh Keresidenan Timor dalam Konprensi Malino pada tanggal 18 Juli 1946

mendukung penggabungan Keresidenan Timor, Flores, Sumba dan Daerah taklukannya dengan Bali, Lombok dan Pulau-pulau Selatan Daya menjadi suatu Daerah Otonom dalam lingkup Pemerintahan Republik Indonesia, yang kemudian dikenal dengan Wilayah Propinsi Sunda Kecil.

Selanjutnya pada tanggal 21 Oktober 1946, Raja-raja (Kepala Swapraja) seluruh Keresidenan Timor mengadakan sidang di Kota Kefamenanu guna membentuk *Timor Eiland Federatie* (Gabungan Kerajaan Afdeeling Timor). Dalam sidang tersebut, H.A. Koroh (Raja Amarasi) dan A. Nisoni (Raja Kupang) terpilih masing-masing sebagai ketua dan ketua muda *Timor Eiland Federatie*. Raja-raja TTU yang hadir dalam sidang tersebut adalah Sobe Senak dari Kerajaan Swapraja Miomaffo, L. Taolin dari Kerajaan Swapraja Insana dan L. Manlea dari Kerajaan Biboki Utara. Dalam forum ini disusunlah Dewan Perwakilan Rakyat *Timor Eiland Federatie* yang susunan keanggotaannya berdasarkan Daerah asal Kerajaan/Swapraja. Swapraja Miomaffo mendudukkan P. Koning, Swapraja Insana mendudukkan Th. Van de Tilart dan Swapraja Biboki mendudukkan H. Van Wissing.

Dalam tahun 1949 terjadi reorganisasi *Timor Eiland Federatie* menjadi Daerah Timor dan Kepulauannya yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Timor dan Kepulauannya Nomor 10/DR tanggal 29 April 1949. Sesuai reorganisasi tersebut dipilih kembali DPRD Timor dan Kepulauannya, Tan Soe Fat mewakili Wilayah Kerajaan Miomaffo, L. Taneo (Insana) dan L. Ati (Biboki).

Sidang DPRD Timor dan Kepulauannya di Kupang tanggal 10–12 Mei 1950 dan juga disetujui secara aklamasi oleh Dewan Raja-raja Timor dan Kepulauannya yang menghasilkan resolusi mendesak kepada Pemerintah Republik Indonesia Serikat dan Negara Indonesia Timur supaya secepatnya Negara Indonesia Timur dibubarkan dan dileburkan kedalam Republik Indonesia serta menganjurkan agar Daerah Timor dan Pulau-pulaunya menjadi bagian dari Republik Indonesia.

2. Pembentukan Kabupaten Dati II TTU

a. Masa Tahun 1958 – 1961

Berdasarkan Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 (Lembaran Negara Nomor 115 1958) Provinsi Sunda Kecil dipecah menjadi Swantara I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Kemudian didasarkan pada Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat II, maka Daerah Swantara NTT dibagi menjadi 12 Daerah Swantara Tingkat II termasuk TTU.

Kabupaten Dati II TTU meliputi 3 Wilayah bekas Kerajaan/Swapraja, 18 kefetoran dan 176 ketemukungan. Secara *de jure* Kabupaten Dati II TTU ada sejak diundangkan UU No. 69 tahun 1958 tanggal 9 Agustus 1958, namun secara *de facto* baru dimulai pada Bulan November 1958 bersamaan dengan pelantikan Pejabat Sementara Kepala Daerah Dati II TTU yang dijabat oleh D.C. Saudale. Setahun kemudian (1 Maret 1959) dilantik pula Pejabat Sementara

Sekretaris Daerah yang dijabat oleh G.M Parera. Pada tahun 1958 sampai 1960 Anggaran Belanja ketiga Swapraja tersebut belum di cabut, baru pada tanggal 1 Januari 1961 disatukan dalam Anggaran Belanja Daerah Tk. II TTU berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk. I NTT Nomor 81/Des.65/2/23 tanggal 15 Desember 1960. Dengan diberlakukannya Keputusan Gubernur tersebut, maka secara diam-diam penghapusan Daerah Swapraja Miomaffo, Insana, Biboki telah dilakukan secara *de facto*, sedangkan secara *de jure* baru pada saat diundangkannya Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1965 pada tanggal 1 September 1965.

b. Masa Tahun 1961 – 1972

Setelah Daerah Swapraja dibubarkan secara *de facto*, maka dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk. I NTT Nomor Pem. 66/1962 Tanggal 28 Februari 1962 dan Surat Keputusan Tanggal 5 Juni 1962 Nomor Pem. 66/1./33 terbentuk empat Kecamatan Administratif dalam Wilayah Kabupaten TTU yakni, Kecamatan Miomaffo Timur dengan Ibukotanya Kota Kefamenanu, Kecamatan Miomaffo Barat Ibukotanya Noeltoko, Kecamatan Biboki Ibukotanya Manufui dan Kecamatan Insana dengan Ibukotanya Oelolok.

Dengan pertimbangan luas Wilayah dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan maka berdasarkan Surat Keputusan Gubernur KDH Tk. I NTT Tanggal 20 Juli 1963 Nomor Pem. 66/1/32 Kecamatan Biboki dimekarkan menjadi Kecamatan Biboki Selatan

dengan Ibukotanya Manufui dan Kecamatan Biboki Utara dengan Ibukotanya Manumean yang kemudian dipindahkan ke Lurasik. Kemudian Surat Keputusan Gubernur KDH Tk. I NTT Nomor 66 Tahun 1969 Tanggal 10 Desember 1969 dibentuk satu koordinator Pemerintahan Kota (Kopeta) yaitu Kopeta Kefamenanu yang terdiri dari 3 Desa yaitu Desa Kefamenanu Utara, Kefamenanu Tengah dan Kefamenanu Selatan. Tahun 1971 melalui Surat Keputusan Gubernur KDH Tk. I NTT Nomor 8 Tahun 1971 dibentuk lagi 3 Perwakilan Kecamatan yakni Perwakilan Kecamatan Miomaffo Timur dengan Ibukotanya Noemuti, Perwakilan Kecamatan Insana Ibukotanya Wini dan Perwakilan Kecamatan Biboki Utara dengan Ibukotanya Ponu.

Menindaklanjuti Instruksi Gubernur KDH Tk. I NTT Tanggal 1964 Nomor Und.2/1/27/1964 tentang Pembentukan Desa Gaya Baru maka sesuai Keputusan Bupati KDH Tk. II TTU Tanggal 7 Mei 1969 Nomor DD.12/II/I/1969 terbentuklah Desa–desa gaya baru dari Kabupaten TTU untuk menggantikan sistem Pemerintahan lama yang disebut ketemukungan. Jumlah desa yang dibentuk pada tahun 1969 – 1971 sebanyak 112 Desa yang berada di lima Wilayah Kecamatan.

c. Masa Tahun 1972 – Sekarang

Sesuai Keputusan Gubernur KDH Tk. I NTT tanggal 1 November 1971 Nomor 41 Tahun 1971 maka Bupati KDH Tk. II TTU mengeluarkan Surat Keputusan Tanggal 2 Oktober 1972 tentang Pengangkatan Kepala Desa, Panitera Desa, Pamong Desa dan Pesuruh

Desa seKabupaten TTU yang masa jabatannya baru akan berakhir pada tahun 1977.

Pada tahun 1978 jumlah Desa masih tetap sama yakni 112 Desa namun tersebar dalam 5 Kecamatan, 3 Perwakilan dan 1 Kopeta Kota Kefamenanu. Kemudian menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 8 September 1976 Nomor Pem. 2/3/35 tentang Pembentukan dan pemekaran Desa maka berturut-turut tahun 1993 jumlah Desa/Kelurahan menjadi 115 Desa/Kelurahan dan tahun 1997 menjadi 118 Desa/Kelurahan.

Seiring dengan semakin meningkatnya tuntutan masyarakat akan kinerja pelayanan publik yang prima dari Institusi Pemerintah, maka sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur NTT Nomor 20 tahun 1999 tanggal 29 Mei 1999, jumlah Desa/Kelurahan yang berjumlah 127 pada tahun 1998 dimekarkan lagi menjadi 159 Desa/Kelurahan pada tahun 1999. Selanjutnya sesuai Peraturan Daerah Kabupaten TTU Nomor 11 Tahun 2000 dilakukan peningkatan status tiga Kecamatan Perwakilan menjadi Kecamatan Definitif yakni Perwakilan Kecamatan Miomaffo Timur menjadi Kecamatan Noemuti, Perwakilan Kecamatan Insana menjadi Kecamatan Insana Utara dan Perwakilan Kecamatan Biboki Utara menjadi Kecamatan Biboki Anleu. Dengan demikian pada tahun 2003 telah terbentuk 9 Kecamatan, 126 Desa dan 33 Kelurahan atau 159 Desa/Kelurahan di Kabupaten Timor Tengah Utara.

Pada penghujung tahun 2004 terjadi lagi pemekaran Desa sesuai Amanat Surat Keputusan Bupati TTU nomor 44 tahun 2004 dibentuklah tiga Desa di Kecamatan Insana dan satu Desa di Kecamatan Insana Utara. Dengan demikian sampai akhir tahun 2004 secara administratif Kabupaten Timor Tengah Utara terdiri dari 9 Wilayah Kecamatan dan 163 Desa/Kelurahan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten TTU nomor 8 tahun 2007, maka jumlah Kecamatan sampai saat ini adalah 24 Kecamatan atau bertambah sebanyak 15 Kecamatan yang dimekarkan dari 9 Kecamatan sebelumnya, dengan 174 Desa/Kelurahan atau bertambah 11 Desa/Kelurahan. Dari Kecamatan Miomaffo Barat mekar 3 Kecamatan baru yaitu: Kecamatan Miomaffo Tengah, Musi dan Mutis; Kecamatan Miomaffo Timur bertambah 5 Kecamatan baru yaitu: Kecamatan Bikomi Selatan, Bikomi Tengah, Bikomi Nilulat, Bikomi Utara dan Naibenu; Kecamatan Noemuti mekar satu Kecamatan baru yaitu Kecamatan Noemuti Timur; Kecamatan Insana mekar dua Kecamatan baru yaitu Kecamatan Insana Tengah dan Kecamatan Insana Barat; Kecamatan Insana Utara bertambah satu Kecamatan baru yaitu Kecamatan Insana Fafinesu; Kecamatan Biboki Selatan bertambah dua Kecamatan baru yaitu Kecamatan Biboki Tanpah dan Kecamatan Biboki Moenleu; sedangkan Kecamatan Biboki Utara mekar satu Kecamatan baru yaitu Kecamatan Biboki Feotleu.

Tabel 4.1 Kecamatan dan Ibukota Kecamatan, serta Jumlah Desa/Kelurahan Tiap - tiap Kecamatan Tahun 2008

No.	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Desa	Kelurahan	Jumlah
1	Miomaffo Barat	Eban	10	2	12
2	Miomaffo Tengah	Bijaepasu	5	-	5
3	Musi	Oeolo	6	-	6
4	Mutis	Naekake	4	-	4
5	Miomaffo Timur	Nunpene	9	2	11
6	Bikomi Selatan	Naiola	6	-	6
7	Bikomi Tengah	Nimasi	8	-	8
8	Bikomi Nilulat	Sunkaen	6	-	6
9	Bikomi Utara	Napan	9	-	9
10	Naibenu	Manamas	4	-	4
11	Noemuti	Noemuti	7	5	12
12	Noemuti Timur	Haekto	4	-	4
13	Insana	Kiupukan	9	4	13
14	Insana Tengah	Maubesi	4	1	5
15	Insana Barat	Mamsena	6	1	7
16	Insana Utara	Wini	4	1	5
17	Insana Fafinesu	Fatuhao	6	-	6
18	Biboki Selatan	Manufui	6	2	8
19	Biboki Tanpah	Oenopu	4	-	4
20	Biboki Moenleu	Kaubele	7	-	7

Tabel 4.1 (Lanjutan) Kecamatan dan Ibukota Kecamatan, serta Jumlah Desa/Kelurahan Tiap - tiap Kecamatan Tahun 2008

No.	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Desa	Kelurahan	Jumlah
21	Biboki Utara	Lurasik	6	1	7
22	Biboki Feotleu	Manumean	5	-	5
23	Biboki Anleu	Ponu	8	1	9
24	Kota Kefa	Sasi	-	9	9
Jumlah			143	31	174

Sumber: BPS Kabupaten TTU (Timor Tengah Utara dalam angka tahun 2009)

B. Keadaan Geografis

1. Letak Wilayah

Secara astronomis Kabupaten TTU terletak diantara:

Utara: 9° 2' 48" Lintang Selatan

Selatan: 9° 37' 36" Lintang Selatan

Timur: 124° 4' 2" Bujur Timur

Barat: 124° 46' 0" Bujur Timur

2. Luas Wilayah

Luas wilayah daerah (daratan) kabupaten TTU adalah 2.669,70 km² atau 5,64 persen dari luas daratan propinsi Nusa Tenggara Timur, sedangkan luas perairannya (laut) 950 km².

3. Batas Wilayah

Batas – batas wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara secara administratif:

- a) Sebelah Selatan berbatasan dengan wilayah Kabupaten timor Tengah Selatan.
- b) Sebelah Utara berbatasan dengan wilayah Ambenu (Timor Leste) dan Laut Sawu.
- c) Sebelah Timur berbatasan dengan wilayah Kabupaten Belu
- d) Sebelah Barat berbatasan dengan Wilayah Kabupaten Kupang dan Kabupaten Timor Tengah Selatan.

4. Topografi

Dipandang dari aspek topografi, luas wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara berada pada ketinggian:

Ketinggian 0 – 25 m	: 6.519,69 Ha
Ketinggian 26 – 100 m	: 11.186,000 Ha
Ketinggian 101 – 500 m	: 149.944,935 Ha
Ketinggian 501 – 1000 m	: 88.908,875 Ha
Ketinggian diatas 1000m	: 10.410,500 Ha

5. Jenis Tanah

Dari Lembaga Penelitian Tanah (LPT) Bogor, memperlihatkan bahwa di Kabupaten TTU dapat ditemukan tiga jenis tanah yaitu:

- a) Tanah Litosol : 1.666,96 km² (62,44 %)
- b) Tanah Kompleks : 479,48 km² (17,96 %)
- c) Tanah Glumosol : 523,26 km² (19,60 %)

6. Klimatologis

Suhu udara : 22° C – 34° C

Kelembaban udara : 69 % - 87 %

Penyinaran matahari : 50 % - 98 %

C. Penduduk dan Tenaga Kerja

1. Penduduk

Tema kependudukan selalu muncul menjadi suatu permasalahan yang hangat dan menarik untuk diperdebatkan karena mempunyai kaitan yang erat dengan kesejahteraan manusia. Perkembangan penduduk yang pesat tanpa diimbangi dengan persediaan sumber daya alam dan sumber dana, maka hanya akan menjadi beban bagi pembangunan. Sebaliknya bila percepatan pertumbuhan penduduk jauh lebih lambat dari percepatan penambahan sumber daya alam dan sumber dana yang ada, maka penduduk dengan banyak kualitas yang memadai akan menjadi modal pembangunan yang sangat berharga. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah dalam berbagai format perencanaan selalu menempatkan kerangka kependudukan sebagai acuannya, karena penduduk dengan aspek dan kuantitasnya merupakan pelaku sentral sekaligus sebagai objek yang menikmati hasil – hasil pembangunan secara lebih adil dan merata.

a. Kepadatan Penduduk

Jumlah penduduk kabupaten timor tengah utara sampai akhir tahun 2008 sesuai hasil registrasi sebanyak 225.094 jiwa dengan tingkat kepadatan rumah tangga 4 orang dan kepadatan

penduduk 84 orang per Km². Penduduk terbanyak di Kabupaten TTU terdapat di Kecamatan Kota Kefamenanu sebanyak 15,9 persen, sedangkan jumlah penduduk paling sedikit terdapat di Kecamatan Noemuti Timur yaitu sebesar 1,7 persen. Kota Kefamenanu merupakan Kecamatan dengan tingkat kepadatan rumah tangga dan tingkat kepadatan penduduk tertinggi yaitu masing – masing sebesar 5 orang/rumah tangga dan 483 orang/Km². Berikut adalah tabel yang menunjukkan jumlah penduduk, rumah tangga, luas wilayah, kepadatan penduduk dan kepadatan rumah tangga menurut Kecamatan di Kabupaten TTU.

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk, Rumah Tangga, Luas Wilayah, Kepadatan Penduduk dan Kepadatan Rumah Tangga menurut Kecamatan di Kabupaten TTU Tahun 2008

No.	Kecamatan	Jumlah penduduk	Jumlah Rumah tangga	Luas wilayah (Km ²)	Kepadatan penduduk	Kepadatan rumah tangga
1	Miomaffo Barat	14.774	3.904	199,63	4	74
2	Miomaffo Tengah	5.355	1.390	75,00	4	71
3	Musi	6.115	1.594	82,17	4	74
4	Mutis	6.376	1.677	90,50	4	70
5	Miomaffo Timur	11.228	2.962	101,45	4	111
6	Noemuti	11.061	2.798	155,60	4	71
7	Bikomi Selatan	7.993	2.334	48,68	3	164
8	Bikomi Tengah	7.166	1.846	61,50	4	117
9	Bikomi Nilulat	4.759	1.234	82,00	4	58

Tabel 4.2 (Lanjutan) Jumlah Penduduk, Rumah Tangga, Luas Wilayah, Kepadatan Penduduk dan Kepadatan Rumah Tangga menurut Kecamatan di Kabupaten TTU Tahun 2008

10	Bikomi Utara	5.711	1.601	70,70	4	81
11	Naibenu	5.373	1.254	88,00	4	61
12	Noemuti Timur	3.782	913	55,77	4	68
13	Kota Kefamenanu	35.727	7.561	74,00	5	483
14	Insana	18.595	4.271	333,08	4	56
15	Insana Barat	8.703	2.510	102,00	3	85
16	Insana Tengah	8.984	2.114	124,00	4	72
17	Insana Utara	8.225	1.985	53,84	4	158
18	Insana Fafinesu	5.518	1.287	52,88	4	104
19	Biboki Selatan	6.687	2.158	164,17	4	57
20	Biboki Tanpah	4.328	1.435	19,15	3	44
21	Biboki Moenleu	6.687	1.600	85,78	4	78
22	Biboki Utara	10.106	2.412	138,70	4	73
23	Biboki Anleu	14.834	3.465	206,40	4	72
24	Biboki Feotleu	3.986	898	124,70	4	32
TTU		225.094	55.203	2.669,70	4	84

Sumber: Hasil Olah Registrasi Penduduk 2008, BPS TTU (TTU Dalam Angka 2009).

b. Komposisi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Jumlah penduduk Kabupaten Timor Tengah Utara pada tahun 2008 sebanyak 225.094 didominasi oleh penduduk perempuan daripada penduduk laki-laki yang terdiri dari 112.055 laki-laki dan 113.039 perempuan dengan angka *sex ratio* sebesar

99 yang menunjukkan bahwa penduduk laki-laki lebih rendah dari penduduk perempuan yakni pada setiap 99 penduduk laki-laki terdapat 100 orang penduduk perempuan.

2. Tenaga Kerja

Penduduk usia kerja didefinisikan sebagai penduduk yang berumur 10 tahun keatas yang terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Proporsi penduduk yang tergolong angkatan kerja dikenal dengan istilah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). TPAK biasanya mengikuti pola huruf "U" terbalik. Angka ini rendah pada umur-umur muda (karena sekolah), kemudian naik sejalan dengan kenaikan umur sampai mencapai puncaknya pada sekitar umur 25 – 29 tahun dan selanjutnya turun lagi secara perlahan-lahan pada umur –umur berikutnya (antara lain karena pensiun, kesehatan yang tidak memungkinkan dan telah mencapai usia yang tua sekali).

TPAK di suatu wilayah dapat pula diartikan sebagai kesiapan penduduk diwilayah bersangkutan untuk terjun ke pasar kerja baik sebagai pekerja maupun pencari kerja. Pada tahun 2008, TPAK Kabupaten Timor Tengah Utara sebesar 75,8 persen (Tabel 4.3). Sedangkan untuk komposisi penduduk yang bekerja berdasarkan lapangan usaha pada tahun 2008 menunjukkan bahwa sebesar 67,7 persen penduduk bekerja pada sektor pertanian sebagai lapangan pekerjaan utama, selebihnya masing-masing sebesar 13,9 persen penduduk bekerja pada sektor sekunder (pertambangan, penggalan,

industri, listrik, gas, air minum dan konstruksi) dan 18,4 persen penduduk bekerja pada sektor tersier (perdagangan, angkutan, keuangan, dan jasa). Hal ini juga menggambarkan bahwa telah terjadi pergeseran komposisi penduduk yang bekerja disetiap sektornya, dimana sektor pertanian mulai menunjukkan penurunan persentase sedangkan sektor sekunder dan tersier mengalami peningkatan persentase penduduk bekerja.

Tabel 4.3 Penduduk Umur 15 tahun Ke Atas menurut Kegiatan Seminggu yang Lalu di Kabupaten TTU Tahun 2008

No.	Kegiatan Seminggu yang Lalu	Jumlah
A.	<u>Angkatan Kerja</u>	<u>110.647</u>
	1. Bekerja	107.343
	2. Mencari pekerjaan	3.304
B	<u>Bukan angkatan kerja</u>	<u>35.396</u>
	1. Sekolah	14.360
	2. Mengurus rumah tangga	15.682
	3. Lainnya	5.354
C	<u>Persentase bekerja terhadap angkatan kerja</u>	<u>97,01</u>
D	<u>Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)</u>	<u>75,76</u>
E	<u>Persentase pengangguran terbuka</u>	<u>2,99</u>

Sumber: Diolah dari Sakernas 2008, Badan Pusat Statistik TTU (TTU Dalam angka 2009).

D. Sosial

1. Pendidikan

Keberhasilan pembangunan suatu bangsa tidak terlepas dari kemajuan dunia pendidikan yang pada gilirannya membawa dampak positif bagi masa depan bangsa. Demikian pentingnya peran pendidikan, maka tidaklah mengherankan apabila pendidikan senantiasa mendapat perhatian dari pemerintah maupun kalangan swasta. Sejalan dengan hal tersebut, peningkatan partisipasi sekolah dari berbagai lapisan masyarakat tentunya harus diimbangi dengan penyediaan sarana fisik pendidikan maupun tenaga pendidik baik Guru maupun Dosen yang memadai. Perkembangan pendidikan di Kabupaten Timor Tengah Utara secara umum dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4.4 Banyaknya Sekolah, Guru dan Murid menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten TTU Tahun 2008

Tingkat Pendidikan	Sekolah	Guru/Dosen	Murid/ Mahasiswa
Taman Kanak-Kanak (TK)	22	115	1.508
Sekolah Dasar (SD)	243	2.590	38.027
SLTP	72	1.036	13.482
SLTA	14	332	5.689
SMK	7	146	1.484
Akademi/Diploma	2	48	150
Perguruan Tinggi	1	81	2.665

Sumber: Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten TTU, BPS TTU 2009.

2. Kesehatan

Pembangunan bidang kesehatan bertujuan agar semua lapisan masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, merata, dan mudah. Dengan tujuan yang demikian, diharapkan seluruh program dan kegiatan dibidang kesehatan diarahkan untuk tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang baik dan pada gilirannya tercipta kehidupan yang sehat dan produktif. Pelayanan kesehatan yang diberikan bagi penduduk dilaksanakan secara terpadu dan menyeluruh dengan membangun pos persalinan desa (Polindes) dan puskesmas disetiap desa dan kecamatan disertai dengan penyediaan tenaga, sarana dan prasarana medis yang memadai.

Tabel 4.5 Jumlah Sarana Kesehatan di Kabupaten TTU Tahun 2008

<i>Sarana Kesehatan</i>	<i>Pemerintah</i>	<i>Swasta</i>	<i>Jumlah</i>
Rumah sakit umum	1	1	2
Puskesmas non perawatan	10	-	10
Puskesmas pembantu	52	-	52
Puskesmas perawatan	5	-	5
Polindes	106	-	106
Toko obat/apotik	-	13	13
Balai pengobatan/BKIA	-	12	12
Jumlah	174	26	200

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten TTU, BPS TTU 2009

3. Agama

Dewasa ini sebagian masyarakat kita mempunyai sensitifitas yang tinggi terhadap masalah-masalah keagamaan. Karena itu, apabila terjadi pemaksaan kehendak pemeluk agam tertentu kepada pemeluk agama lainnya maka akan menimbulkan konflik sosial yang berkepanjangan. Dalam hal ini pemerintah dituntut untuk memfasilitasi kehidupan beragama bagi masyarakatnya, sehingga setiap pemeluknya memiliki hak yang sama untuk menunaikan kewajiban-kewajibannya.

Ada lima agama resmi yang dianut oleh penduduk Kabupaten TTU dan diakui oleh pemerintah yakni, Katolik, Islam, Protestan, Hindu dan Budha. Dari komposisi penduduk Kabupaten Timor Tengah Utara sebanyak 225.094 jiwa mayoritas penduduknya beragama katolik dengan persentase 92,20% sedangkan minoritas beragama Hindu/Budha dengan persentase 0,03%.

Tabel 4.6 Urutan jumlah pemeluk agama di Kabupaten TTU Tahun 2008

<i>Agama</i>	<i>Jumlah</i>	<i>Persentase (%)</i>
Katolik	209.174	92,20
Protestan	13.534	6,01
Islam	2.313	1,03
Hindu/Budha	73	0,03
Jumlah	225.094	100

Sumber: Badan Pusat Statistik TTU, 2009

E. Sumber Daya Alam

1. Pertanian

Alam Kabupaten Timor Tengah Utara yang beriklim tropis merupakan penghasil beragam jenis tanaman pertanian maupun tanaman perkebunan. Tanaman pertanian di Kabupaten Timor Tengah Utara berupa padi, jagung, ubi-ubian, kacang-kacangan dan sayur-sayuran. Jagung merupakan komoditi terbesar yang diproduksi oleh penduduk Kabupaten Timor Tengah Utara karena sebagian penduduk masih mengkonsumsi jagung sebagai makanan pokok mereka. Pada tahun 2008 produksi jagung meningkat sebesar 32,86 persen dari tahun sebelumnya atau sebanyak 31.429 ton pipilan kering, sedangkan produksi ubi-ubian menurun 1,99 persen dari tahun sebelumnya.

Selain tanaman pertanian ada juga tanaman jenis perkebunan yang dihasilkan yaitu kelapa, kemiri, jambu mete, pinang, kapuk dan kopi. Jambu mete sebagai komoditas unggulan Daerah, pada tahun 2008 baru menghasilkan 1.486 ton yang dihasilkan dari areal tanam seluas 11.196 Ha atau dengan produktivitas rata-rata 7,53 kwintal per Ha atau naik 1,3 persen. Tanaman kemiri juga merupakan salah satu potensi Kabupaten TTU, dan pada tahun 2008 menghasilkan 1.595 ton dari area tanam seluas 10.001 Ha. Sedangkan produksi pinang pada tahun 2008 hanya sebesar 452 ton atau turun sebesar 23,6 persen dari tahun sebelumnya.

2. Kehutanan

Hutan memiliki peranan penting kelestarian alam dan menopang kehidupan komunitas ekosistem alam di sekitarnya. Luas hutan di Kabupaten TTU adalah 126.235 Ha atau sekitar 43,7 persen dari luas wilayah daratan. Primadona hasil hutan berupa kayu cendana, namun saat ini populasi maupun produksi kayu cendana menurun bahkan untuk populasinya terancam punah, penyebabnya adalah penebangan kayu cendana dalam jumlah besar dan tidak disertai dengan penanaman kembali. Hasil hutan lainnya yang menonjol adalah kayu jati bulat dengan produksi 66.072 m³ ditahun 2008, kayu jati persegi jenis dolgen 34.652 m³, kemiri isi 267,25 ton, asam isi 425,50 ton dan madu 25 liter.

3. Peternakan

Peternakan merupakan salah satu sektor vital yang mampu menyanggah kehidupan ekonomi sebagian besar keluarga tani di Pedesaan. Paling tidak dengan memelihara ternak, rumah tangga tani dapat membiayai kebutuhan di luar pangan seperti menyekolahkan anak, membiayai kesehatan, perumahan dan bahkan pada saat kondisi kritis seperti gagal panen, komoditi ternak justru diandalkan untuk menopang pengadaan ketersediaan pangan keluarga. Jumlah rumah tangga usaha ternak di Kabupaten TTU pada tahun 2008 mengalami perubahan dari tahun sebelumnya, dimana sebagian ternak besar maupun ternak kecil mengalami peningkatan diatas 100,00 persen dari

tahun sebelumnya (Sapi naik 244%, Babi naik 242%, Ayam Buras/Ayam Kampung naik 208%, Kerbau naik 175%, Kambing/Domba naik 169%, Kuda naik 148%).

Kabupaten Timor Tengah Utara sebagai Daerah yang menyandang predikat "Gudang Ternak" di Propinsi NTT, pada tahun 2008 tercatat populasi Sapinya sebanyak 86.239 ekor atau meningkat 17,8 persen dibanding tahun sebelumnya.

Tabel 4.7 Populasi ternak menurut jenis ternak di kabupaten TTU Tahun 2006 - 2008 (ekor)

Jenis Ternak	2006	2007	2008
1. Sapi Perah	-	-	-
2. Sapi	75.475	84.731	86.239
3. Kerbau	706	528	635
4. Kuda	1.311	1.220	1.513
5. Babi	73.761	84.789	86.753
6. Kambing/Domba	39.364	39.991	39.873
7. Ayam Buras/Kampung	123.007	117.932	203.743
8. Ayam Ras	138	4.123	4.719
9. Itik/Itik Manila	44.652	3.963	3.123

Sumber: Dinas Peternakan Kabupaten TTU, BPS TTU 2009

4. Perikanan

Komoditas Perikanan memiliki nilai ekonomis tinggi karena selain menjadi bahan pangan yang memiliki kandungan protein yang tinggi, juga mampu memberikan kehidupan yang layak bagi keluarga

tani nelayan. Dengan semakin terbatasnya lahan pertanian yang subur belakangan ini, sektor perikanan dengan program GEMALA (Gerakan Masuk Laut) diharapkan menjadi alternatif lapangan kerja yang menjanjikan bagi angkatan kerja baru.

Produksi ikan di Kabupaten TTU sebagian besar dari perikanan laut. Dari total produksi 127,32 ton pada tahun 2008, sebanyak 94,66 persen atau 120,52 ton diantaranya adalah produksi perikanan laut, sedangkan sisanya 6,80 ton atau 5,34 persen adalah produksi perikanan darat, yang mencakup perairan umum, tambak, kolam dan sawah.

F. Perindustrian dan Perdagangan

1. Perindustrian

Perkembangan industri di Kabupaten Timor Tengah Utara relatif lambat, bahkan cenderung berjalan ditempat. Hal ini disebabkan karena industri ini didominasi oleh sub sektor industri kerajinan rumah tangga yang kapasitas produksinya sangat terbatas, bersifat padat karya dan rentan terhadap krisis karena memiliki akses lokal dan keterbatasan daya beli serta sebagian usaha adalah usaha sampingan yang bersifat musiman dengan kemampuan modal yang terbatas. Pada tahun 2008 jumlah usaha industri di Kabupaten TTU sebanyak 890 unit, sama dengan tahun sebelumnya yang terdiri dari 562 unit industri kerajinan tenun ikat yang tersebar merata di seluruh Kecamatan atau sebesar 63%, sisanya untuk industri pangan kecil 3,30%, industri kecil

kimia dan bahan bangunan 5,30%, industri kecil logam dan elektronika sebesar 5,00%, industri kerajinan 4,54%, dan industri kecil sandang sebesar 0,53%.

2. Perdagangan

Pada tahun 2008, perusahaan disektor perdagangan yang telah terdaftar sebagai pemegang surat ijin usaha di Kabupaten Timor Tengah Utara berjumlah 203 unit dengan klasifikasi jenis usaha perdagangan besar 5 unit atau 2,5%, perdagangan menengah 22 unit (10,8%) dan perdagangan kecil/eceran sebanyak 176 unit atau 86,7%.

BAB V

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Data

1. Perbandingan Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara tahun anggaran 2003-2008

Perbandingan Pendapatan Pajak Daerah dapat dihitung menggunakan Analisis Angka Indeks Berantai. Angka Indeks Berantai (*Chain Index Number*) adalah angka indeks yang menggunakan tahun dasar atau periode sebelumnya sebagai dasar perhitungannya (Santoso dan Hamdani, 2007: 179). Angka indeks berantai tidak memakai suatu tahun dasar atau waktu dasar yang tetap namun berdasarkan tahun atau waktu dasar yang mendahuluinya. Mengingat bahwa angka indeks berantai ini ditentukan berdasarkan tahun atau waktu dasar yang mendahuluinya, maka dari deretan indeks ini lebih mudah membuat perbandingan tentang perkembangan dari tahun ke tahun atau dari waktu ke waktu yang berurutan. Angka indeks berantai merupakan angka indeks yang waktu dasarnya terus bergeser atau bergerak.

Untuk mengetahui perbandingan pendapatan pajak daerah pada tahun anggaran 2003-2008 digunakan analisis angka indeks berantai, dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Angka indeks pajak daerah} = \frac{\text{jumlah realisasi pendapatan pajak daerah tahun yang dicari}}{\text{jumlah realisasi pendapatan pajak daerah tahun sebelumnya}} \times 100\%$$

Untuk memudahkan perhitungan ini, disajikan tabel Pendapatan Pajak Daerah dan total Pendapatan Asli Daerah tahun 2003-2008.

Tabel 5.1 Realisasi Pajak Daerah Dalam PAD Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2003-2008

Tahun	Realisasi Pendapatan Asli Daerah	
	Realisasi Pajak Daerah	Daerah
2003	Rp. 605.606.655	Rp. 5.346.333.591,53
2004	530.493.396	7.616.152.684,94
2005	663.593.400	6.374.452.659,10
2006	758.867.777	9.956.341.125,63
2007	914.098.553	15.973.874.030,99
2008	1.011.390.129	20.176.422.704,71

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten TTU

Berdasarkan data pada tabel 5.1 diatas, perhitungan angka indeks untuk pajak daerah adalah sebagai berikut:

1. Tahun 2003

$$\begin{aligned}
 \text{angka indeks pajak daerah} &= \frac{\text{pendapatan pajak daerah tahun 2003}}{\text{pendapatan pajak daerah tahun 2003}} \times 100\% \\
 &= \frac{605.606.655}{605.606.655} \times 100\% \\
 &= 100\%
 \end{aligned}$$

2. Tahun 2004

$$\text{Angka indeks pajak daerah} = \frac{\text{pendapatan pajak daerah tahun 2004}}{\text{pendapatan pajak daerah tahun 2003}} \times 100\%$$

$$= \frac{530.493.396}{605.606.655} \times 100\%$$

$$= 88\%$$

Jadi, pendapatan pajak daerah pada tahun 2004 menunjukkan penurunan sebesar 12% dibandingkan pendapatan pajak daerah tahun 2003.

3. Tahun 2005

$$\text{Angka indeks pajak daerah} = \frac{\text{pendapatan pajak daerah tahun 2005}}{\text{pendapatan pajak daerah tahun 2004}} \times 100\%$$

$$= \frac{663.593.400}{530.493.396} \times 100\%$$

$$= 125\%$$

Jadi, pendapatan pajak daerah tahun 2005 mengalami kenaikan sebesar 37% dibandingkan pendapatan pajak daerah tahun 2004.

4. Tahun 2006

$$\text{Angka indeks pajak daerah} = \frac{\text{pendapatan pajak daerah tahun 2006}}{\text{pendapatan pajak daerah tahun 2005}} \times 100\%$$

$$= \frac{758.867.777}{663.593.400} \times 100\%$$

$$= 114\%$$

Jadi, pendapatan pajak daerah pada tahun 2006 turun sebesar 11% dibandingkan pendapatan pajak daerah tahun 2005.

5. Tahun 2007

$$\text{Angka indeks pajak daerah} = \frac{\text{pendapatan pajak daerah tahun 2007}}{\text{pendapatan pajak daerah tahun 2006}} \times 100\%$$

$$= \frac{914.098.553}{758.867.777} \times 100\%$$

$$= 121\%$$

Jadi, pendapatan pajak daerah pada tahun 2007 mengalami peningkatan sebesar 7% dibandingkan pendapatan pajak daerah tahun 2006.

6. Tahun 2008

$$\text{Angka indeks pajak daerah} = \frac{\text{pendapatan pajak daerah tahun 2008}}{\text{pendapatan pajak daerah tahun 2007}} \times 100\%$$

$$= \frac{1.011.390.129}{914.098.553} \times 100\%$$

$$= 111\%$$

Jadi, pendapatan pajak daerah tahun 2008 menunjukkan penurunan sebesar 10% dibandingkan pendapatan pajak daerah tahun 2007.

Dari perhitungan angka indeks pajak daerah diatas akan dibuat sebuah tabel yang menunjukkan angka indeks berantai untuk pendapatan pajak daerah tahun 2003-2008.

Tabel 5.2 Angka Indeks Berantai untuk pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2003-2008

Tahun	Realisasi Pajak Daerah	Angka Indeks Pajak Daerah (%)
2003	Rp. 605.606.655	100
2004	530.493.396	88
2005	663.593.400	125
2006	758.867.777	114
2007	914.098.553	121
2008	1.011.390.129	111

Sumber: Data primer yang diolah

2. Prediksi Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara untuk Tahun Anggaran 2009-2014

Peramalan jumlah Pendapatan Pajak Daerah untuk tahun anggaran yang akan datang 2009-2014, menggunakan Analisis Trend dengan Metode Kuadrat Terkecil (*Least Square Method*) dan persamaan garis Trend yang digunakan adalah $Y' = a + bX$.

Adapun langkah-langkah dalam menghitung Analisis Trend dengan Metode Kuadrat Terkecil (*Least Square Method*), sebagai berikut:

1. Menentukan nilai a dengan rumus:

$$a = \frac{\sum Y}{n}$$

Dimana:

a : Nilai konstanta yaitu pada saat nilai $X = 0$

Y: Jumlah realisasi pendapatan pajak selama tahun anggaran 2003-2008

n : Jumlah tahun yang diprediksi yakni enam tahun, tahun 2003-2008

2. Menentukan nilai b dengan rumus:

$$b = \frac{\sum XY}{\sum X^2}$$

Dimana:

b : Nilai kemiringan yaitu tambahan nilai Y, apabila X bertambah satu satuan/slope

X : Jarak antara tahun yang akan diprediksi dengan tahun tengah atau nilai periode tahun (2009-2014)

3. Menentukan persamaan garis trend dengan rumus:

$$Y' = a + bX$$

Dimana:

Y' : Nilai Trend

a : Nilai konstanta yaitu nilai Y pada saat nilai X = 0

b : Nilai kemiringan yaitu tambahan nilai Y, apabila X bertambah satu satuan/slope

X : Jarak antara tahun yang akan diprediksi dengan tahun tengah atau nilai periode tahun (2009-2014)

4. Melakukan peramalan, menggunakan langkah 1, 2 dan 3.

Dari data tabel 5.1 maka akan dibuatlah persamaan garis trend dengan menggunakan metode kuadrat terkecil untuk meramalkan jumlah pendapatan pajak daerah pada tahun yang akan datang 2009-2014. Berikut perhitungannya:

Tabel 5.3 Perhitungan Trend Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten TTU Tahun 2003-2008

Tahun	Pajak Daerah = Y	X	XY	X ²
2003	605.606.655	- 5	- 3.028.033.275	25
2004	530.493.396	- 3	- 1.591.480.188	9
2005	663.593.400	- 1	- 663.593.400	1
2006	758.867.777	1	758.867.777	1
2007	914.098.553	3	2.742.295.659	9
2008	1.011.390.129	5	5.056.950.645	25
Jumlah	4.484.049.910	0	3.275.007.218	70

Sumber: Data diolah

2) Menentukan nilai a:

$$a = \frac{\Sigma Y}{n}$$

$$a = \frac{4.484.049.910}{6}$$

$$a = 747.341.651,7$$

Nilai a = 747.341.651,70 menunjukkan besarnya pendapatan pajak daerah (Y) pada saat nilai X = 0

- 3) Menentukan nilai b:

$$b = \frac{\sum XY}{\sum X^2}$$

$$b = \frac{3.275.007.218}{70}$$

$$b = 46.785.817,40$$

Nilai $b = 46.785.817,4$ menunjukkan besarnya jumlah kenaikan pendapatan pajak daerah per tahun, atau setiap satu tahun pendapatan pajak daerah bertambah sebanyak Rp 46.785.817,4

- 4) Menentukan persamaan garis trend:

Setelah nilai a dan nilai b diketahui, maka dimasukkan dalam persamaan garis trend:

$$Y' = a + bX$$

$$Y' = 747.341.651,70 + 46.785.817,40X$$

- 5) Melakukan peramalan menggunakan persamaan garis trend pajak daerah yang telah diketahui:

$$Y' = 747.341.651,70 + 46.785.817,40X$$

Sebelum menghitung prediksi jumlah pendapatan pajak daerah untuk tahun anggaran yang akan datang 2009-2014, maka perlu disajikan nilai X yakni jarak antara tahun tengah dengan tahun yang akan diprediksikan (2009-2014). Karena jumlah tahunnya genap maka tahun 2005 dan 2006 merupakan tahun tengah, dimana jarak antara dua waktu yaitu tahun 2005 dan tahun 2006 diberi nilai dua satuan. Dibawah ini

adalah tabel yang menggambarkan jarak tahun yang akan diprediksi (2009-2014) dengan tahun tengah (nilai X).

Tabel 5.4 Jarak Tahun yang akan Diprediksi dengan Tahun Tengah (Nilai X)

Tahun yang akan diprediksi	X
2009	7
2010	9
2011	11
2012	13
2013	15
2014	17

Berdasarkan persamaan garis trend diatas, kita dapat memprediksikan jumlah pendapatan pajak daerah untuk tahun 2009 sampai 2014. Jarak masing-masing tahun yang akan diprediksi yaitu tahun 2009-2014 dapat dilihat pada tabel 5.4 diatas. Maka prediksi jumlah pendapatan pajak daerah untuk tahun 2009 sampai tahun 2014 adalah sebagai berikut:

1. Tahun 2009

$$\begin{aligned}
 Y' &= 747.341.651,70 + 46.785.817,40X \\
 &= 747.341.651,70 + 46.785.817,40 (7) \\
 &= 1.074.842.374
 \end{aligned}$$

Jadi, jumlah pendapatan pajak daerah untuk tahun 2009, diprediksikan sebesar Rp 1.074.842.374

2. Tahun 2010

$$\begin{aligned} Y' &= 747.341.651,70 + 46.785.817,40X \\ &= 747.341.651,70 + 46.785.817,40 (9) \\ &= 1.168.414.008 \end{aligned}$$

Jadi, jumlah pendapatan pajak daerah untuk tahun 2010, diprediksikan sebesar Rp 1.168.414.008.

3. Tahun 2011

$$\begin{aligned} Y' &= 747.341.651,70 + 46.785.817,40X \\ &= 747.341.651,70 + 46.785.817,40 (11) \\ &= 1.261.985.643 \end{aligned}$$

Jadi, jumlah pendapatan pajak daerah untuk tahun 2011, diprediksikan sebesar Rp 1.261.985.643

4. Tahun 2012

$$\begin{aligned} Y' &= 747.341.651,70 + 46.785.817,40X \\ &= 747.341.651,70 + 46.785.817,40 (13) \\ &= 1.355.557.279 \end{aligned}$$

Jadi, jumlah pendapatan pajak daerah untuk tahun 2012, diprediksikan sebesar Rp 1.355.557.279

5. Tahun 2013

$$\begin{aligned} Y' &= 747.341.651,70 + 46.785.817,40X \\ &= 747.341.651,70 + 46.785.817,40 (15) \\ &= 1.449.128.913 \end{aligned}$$

Jadi, jumlah pendapatan pajak daerah untuk tahun 2013, diprediksikan sebesar Rp 1.449.128.913

6. Tahun 2014

$$\begin{aligned} Y' &= 747.341.651,70 + 46.785.817,40X \\ &= 747.341.651,70 + 46.785.817,40 (17) \\ &= 1.542.700.548 \end{aligned}$$

Jadi, jumlah pendapatan pajak daerah untuk tahun 2014, diprediksikan sebesar Rp 1.542.700.548.

B. Pembahasan

1. Perbandingan Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara tahun anggaran 2003-2008

Dari hasil perhitungan pendapatan pajak daerah yang menggunakan analisis angka indeks berantai, dapat diketahui perbandingan pendapatan pajak daerah dari tahun 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007, dan 2007/2008. Perbandingan pendapatan pajak daerah tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 5.5 Angka Indeks Berantai untuk Pajak Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2003-2008

Tahun	Realisasi Pajak Daerah	Angka Indeks Pajak Daerah (%)
2003	Rp. 605.606.655	100
2004	530.493.396	88
2005	663.593.400	125
2006	758.867.777	114
2007	914.098.553	121
2008	1.011.390.129	111

Sumber: Data primer yang diolah

Dalam laporan realisasinya Pendapatan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara dari sektor pajak daerah dari tahun 2003-2008 selalu meningkat, namun pendapatan pajak daerah menurun pada tahun 2004 dan kembali meningkat pada tahun 2005. Dengan demikian, berdasarkan tabel 5.5 diatas dapat dilihat seberapa besar kenaikan maupun penurunan pendapatan pajak daerah pada tahun-tahun tersebut yang telah dihitung menggunakan analisis angka indeks berantai.

Tahun 2004 angka indeks pajak daerah sebesar 88% artinya pada tahun ini realisasi pendapatan pajak daerah menurun sebesar 12% dibandingkan realisasi pendapatan pajak daerah tahun 2003. Pada tahun 2005 angka indeks pajak daerah sebesar 125%, yang menunjukkan bahwa realisasi pendapatan pajak daerah pada tahun ini meningkat sebesar 37% dibandingkan tahun 2004. Tahun 2006 angka indeks pendapatan pajak daerah sebesar 114% yang artinya realisasi pendapatan

pajak daerah turun 11% dibandingkan tahun 2005. Realisasi pendapatan pajak daerah pada tahun 2007 naik 7% dari tahun 2006. Pada tahun 2008 realisasi pendapatan pajak daerah sebesar 111%, atau turun 10% dari realisasi pendapatan pajak daerah tahun 2007. Pada tahun 2008 ini realisasi jumlah pendapatan pajak daerah lebih banyak diperoleh dari pajak pengambilan bahan golongan C seiring bertambahnya penambangan bahan galian golongan C seperti marmer, batu mangan, pasir dan kerikil serta batu kapur.

2. Prediksi Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara untuk Tahun Anggaran 2009-2014

Dari hasil perhitungan prediksi pendapatan pajak daerah Kabupaten Timor Tengah Utara dapat diketahui bahwa pada tahun-tahun yang akan datang yaitu tahun 2009 sampai tahun 2014 jumlah pendapatan pajak daerah akan terus meningkat. Tahun 2009 pendapatan pajak daerah diprediksikan sebesar Rp 1.074.842.374 dan sebesar Rp 1.168.414.008 pada tahun 2010, pendapatan pajak daerah pada tahun 2011 diprediksikan sebesar Rp 1.261.985.643, pada tahun 2012 dan 2013 diprediksikan sebesar Rp 1.355.557.279 dan Rp 1.449.128.913, serta pendapatan pajak daerah tahun 2014 diprediksikan sebesar Rp 1.542.700.548. Berikut adalah tabel yang menunjukkan hasil perhitungan prediksi pendapatan pajak daerah:

Tabel 5.6 Hasil Perhitungan Prediksi Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten TTU Tahun Anggaran 2009-2014

Tahun	Prediksi Pendapatan Pajak Daerah
2009	Rp. 1.074.842.374
2010	1.168.414.008
2011	1.261.985.643
2012	1.355.557.279
2013	1.449.128.913
2014	1.542.700.548

Sumber: Data primer yang diolah.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Perbandingan pendapatan pajak daerah pada tahun 2004 menurun, namun pada tahun 2005 sampai tahun 2008 kembali meningkat sejalan dengan jumlah pendapatan pajak daerah dalam laporan realisasinya. Tahun 2004 angka indeks pajak daerah 88%, berarti pada tahun ini realisasi pendapatan pajak daerah menurun sebesar 12% dari tahun 2003. Tahun 2005 angka indeks pajak daerah naik menjadi 125%. Tahun 2006 realisasi pendapatan pajak daerah turun sebesar 11% dibandingkan tahun 2005. Realisasi pendapatan pajak daerah pada tahun 2007 naik sebesar 7% dibandingkan tahun 2006. Pada tahun 2008 realisasi pendapatan pajak daerah lebih banyak diperoleh dari pajak pengambilan bahan galian golongan C, hal ini disebabkan oleh jumlah penambangan bahan galian golongan C yang semakin bertambah seperti marmer, batu mangan, pasir dan kerikil serta batu kapur.
2. Prediksi pendapatan pajak daerah Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2009-2014 menunjukkan peningkatan. Tahun 2009 pendapatan pajak daerah diprediksikan sebesar Rp 1.074.842.374 dan sebesar

Rp 1.168.414.008 pada tahun 2010 dan seterusnya hingga pada tahun 2014 pendapatan pajak daerah diprediksikan sebesar Rp 1.542.700.548.

B. Keterbatasan Penelitian

Dalam melakukan penelitian pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Penulis menghadapi keterbatasan-keterbatasan penelitian sebagai berikut:

1. Dalam melakukan penelitian, data yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara hanya melalui teknik wawancara dan dokumentasi, sehingga fakta-fakta yang sebenarnya terjadi serta analisis dan hasil analisis ini signifikan hanya pada data-data dari dinas tersebut.
2. Data-data tentang pajak daerah tidak lengkap atau sebagian hilang sehingga penulis mengalami kesulitan untuk melihat laporan keuangan daerah secara keseluruhan.
3. Analisis data menggunakan angka indeks berantai hanya cocok untuk membuat perbandingan dalam jangka pendek, sehingga tidak ada manfaatnya bila digunakan untuk membuat perbandingan jangka panjang.
4. Pajak Parkir sampai saat ini belum berlaku di Kabupaten Timor Tengah Utara sehingga tidak diperhitungkan dalam pendapatan pajak daerah.

C. **Saran**

Peneliti menyadari bahwa hasil penelitian ini belum sempurna, namun dengan hasil penelitian ini penulis memberikan saran yang diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara khususnya Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara:

1. Dari hasil perbandingan angka indeks pajak daerah, diketahui bahwa pendapatan pajak daerah menunjukkan perkembangan kearah yang positif. Dengan demikian, Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara perlu melakukan evaluasi kembali terhadap proses dan hasil yang telah dicapai untuk mengetahui apakah hasil ini sudah optimal, sebanding dengan pelayanan yang diberikan bagi masyarakat.
2. Dari hasil prediksi menggunakan analisis trend dengan metode kuadrat terkecil, pendapatan pajak daerah untuk tahun-tahun yang akan datang menunjukkan peningkatan. Dengan adanya prediksi ini, dapat memberikan gambaran tentang kondisi mendatang pajak daerah pada pemerintah daerah, sehingga dapat digunakan untuk penyusunan rencana, pemanfaatan secara optimal potensi daerah yang ada dan perbaikan sarana dan prasarana pendukung yang dapat menarik investor serta mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pajak daerah sehingga hasil yang dicapai dapat optimal.

3. Data-data yang ada diharapkan untuk disimpan dalam data base sehingga tidak mudah hilang dan dibuat daftar peminjam atau peneliti yang menggunakan data-data tersebut, sehingga apabila ada data yang hilang mudah ditelusuri.
4. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan bisa melakukan observasi langsung jika memungkinkan dan juga memasukkan perhitungan pajak parkir dalam perhitungan pajak daerah jika sudah berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, Lincolin. 2004. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: YKPN.
- Badan Pusat Statistik. *Timor Tengah Utara dalam Angka Tahun 2009*.
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. 1999. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta: BPFEE.
- Kota, Maria Koriyanti. 2005. Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah: Studi kasus pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ende. *Skripsi* Universitas Sanata Dharma.
- Marsyahrul, Tony. 2005. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Grasindo.
- Noegroho, Boedijoewono. 2007. *Pengantar Statistika Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta. UPP STIM YKPN
- Nordiwan, Deddi. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Pasaribu, Amudi. 1981. *Pengantar statistik*. Medan: Ghalia Indonesia.
- Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah nomor 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Santoso dan Hamdani. 2007. *Statistika Deskriptif dalam Bidang Ekonomi dan Niaga*. Jakarta: Erlangga.
- Soemarso, S. Rahardjo. 2007. *Perpajakan Pendekatan Komprehensif*. Jakarta: Salemba Empat
- Sudjana. 1981. *Statistika untuk Ekonomi dan Niaga*. Bandung: Tarsito.
- Suharyadi dan Purwanto. 2007. *Statistika untuk Ekonomi dan Keuangan Modern*. Jilid I (Edisi II). Jakarta: Salemba Empat.

- Supranto, J. 2008. *Statistik Teori dan Aplikasi*. Jilid I (Edisi VII). Jakarta: Erlangga.
- Supranto, J. 2007. *Statistik untuk Pemimpin Berwawasan Global*. Jakarta: Salemba Empat.
- Suratno dan Suparmono. 2002. *Urgensi Pajak Daerah dalam Struktur Pendapatan Asli Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen* (Agustus: 13-21).
- Waluyo. 2008. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

LAMPIRAN

Tabel 1
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara
Tahun Anggaran 2003
(dalam Rupiah)

Jenis Pendapatan	Target	Realisasi
Pendapatan:	192.929.650.026,88	186.236.221.668,53
▪ Pendapatan Asli Daerah (PAD):	6.049.239.550,88	5.346.333.591,53
• Pajak Daerah	585.984.000,00	605.606.655,00
• Retribusi Daerah	1.627.846.105,00	1.326.458.788,00
• Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	753.809.693,00	258.742.083,25
• Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	3.099.599.752,88	3.155.526.065,28
▪ Dana Perimbangan:	177.740.726.646,00	172.445.727.077,00
• Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	15.911.169.146,00	10.676.464.577,00
• Dana Alokasi Umum (DAU)	149.780.000.000,00	149.779.720.000,00
• Dana Alokasi Khusus (DAK)	10.400.000.000,00	10.399.965.000,00
• Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan dari Propinsi	1.649.557.500,00	1.589.577.500,00
▪ Lain-lain Pendapatan yang Sah	9.139.683.830,00	8.444.161.000,00

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten TTU

Tabel 2
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara
Tahun Anggaran 2004
(dalam Rupiah)

Jenis Pendapatan	Target	Realisasi
Pendapatan:	197.559.800.671,00	196.197.540.306,94
▪ Pendapatan Asli Daerah (PAD):	8.179.992.970,00	7.616.152.684,94
• Pajak Daerah	689.692.000,00	530.493.396,00
• Retribusi Daerah	1.806.111.760,00	1.754.279.856,00
• Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	393.250.082,00	393.250.082,00
• Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	5.290.939.128,00	4.938.129.350,00
▪ Dana Perimbangan:	181.419.450.451,00	180.579.992.622,00
• Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	12.527.601.406,00	12.018.456.352,00
• Dana Alokasi Umum (DAU)	157.163.000.000,00	157.163.000.000,00
• Dana Alokasi Khusus (DAK)	8.230.000.000,00	8.230.000.000,00
• Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan dari Propinsi	3.498.849.045,00	3.168.536.270,00
▪ Lain-lain Pendapatan yang Sah	7.960.357.250,00	8.001.395.000,00

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten TTU

Tabel 3
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara
Tahun Anggaran 2005
(dalam Rupiah)

Jenis Pendapatan	Target	Realisasi
Pendapatan:	200.672.874.327,00	203.484.624.808,10
▪ Pendapatan Asli Daerah (PAD):	5.508.950.488,00	6.374.452.659,10
• Pajak Daerah	705.172.000,00	663.593.400,00
• Retribusi Daerah	1.958.377.720,00	1.793.878.459,00
• Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	1.000.000.000,00	849.104.864,00
• Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	1.845.400.768,00	3.067.875.936,00
▪ Dana Perimbangan:	187.792.563.839,00	189.738.812.149,00
• Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	11.188.922.199,00	14.657.686.167,00
• Dana Alokasi Umum (DAU)	158.095.000.000,00	158.094.999.999,00
• Dana Alokasi Khusus (DAK)	13.890.000.000,00	13.890.000.000,00
• Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan dari Propinsi	4.618.641.640,00	3.096.125.983,00
▪ Lain-lain Pendapatan yang Sah	7.371.360.000,00	7.371.360.000,00

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten TTU

Tabel 4
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara
Tahun Anggaran 2006
(dalam Rupiah)

Jenis Pendapatan	Target	Realisasi
Pendapatan:	302.597.616.753,00	301.484.336.880,63
▪ Pendapatan Asli Daerah (PAD):	13.601.259.512,00	9.956.341.125,63
• Pajak Daerah	897.506.450,00	758.867.777,00
• Retribusi Daerah	2.346.811.456,00	2.050.372.787,00
• Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	1.000.000.000,00	554.672.375,09
• Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	9.356.941.606,00	6.592.428.186,54
▪ Dana Perimbangan:	288.908.117.161,00	291.439.755.275,00
• Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	13.602.404.829,00	16.268.413.247,00
• Dana Alokasi Umum (DAU)	239.558.000.000,00	239.558.000.000,00
• Dana Alokasi Khusus (DAK)	29.180.000.000,00	29.180.000.000,00
• Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan dari Propinsi	6.567.712.332,00	6.433.342.028,00
▪ Lain-lain Pendapatan yang Sah	88.240.080,00	88.240.480,00

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten TTU

Tabel 5
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara
Tahun Anggaran 2007
(dalam Rupiah)

Jenis Pendapatan	Target	Realisasi
Pendapatan:	357.848.030.679,70	352.586.361.532,99
▪ Pendapatan Asli Daerah (PAD):	16.161.193.645,10	15.973.874.030,99
• Pajak Daerah	884.723.500,00	914.098.553,00
• Retribusi Daerah	2.511.497.990,00	2.316.356.916,00
• Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	2.200.000.000,00	804.107.584,46
• Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	10.564.972.155,10	11.939.350.977,53
▪ Dana Perimbangan:	318.859.706.954,00	324.734.710.808,00
• Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	15.420.898.300,00	20.851.272.711,00
• Dana Alokasi Umum (DAU)	258.755.000.000,00	260.913.272.278,00
• Dana Alokasi Khusus (DAK)	44.418.000.000,00	42.764.900.000,00
• Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan dari Propinsi	265.808.654,00	205.265.819,00
▪ Lain-lain Pendapatan yang Sah	22.827.130.080,60	11.877.776.694,00

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten TTU

Tabel 6
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara
Tahun Anggaran 2008
(dalam Rupiah)

Jenis Pendapatan	Target	Realisasi
Pendapatan	412.783.422.622,71	383.523.451.492,71
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	16.214.066.409,71	20.176.422.704,71
Pajak Daerah:	863.791.603,00	1.011.390.129,00
• Pajak hotel	5.820.000,00	3.634.000,00
• Pajak restoran	49.340.000,00	48.698.744,00
• Pajak hiburan	6.728.000,00	900.000,00
• Pajak reklame	13.200.750,00	17.733.000,00
• Pajak penerangan jalan	33.463.000,00	32.427.549,00
• Pajak pengambilan bahan galian golongan C	755.239.853,00	907.996.836,00

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah kabupaten TTU

Tabel 7
Target dan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara
Tahun Anggaran 2009
(dalam Rupiah)

Jenis Pendapatan	Target	Realisasi
Pajak Daerah:	1.022.551.750,00	3.866.353.580,00
• Pajak hotel	5.820.000,00	4.244.000,00
• Pajak restoran	49.340.000,00	131.522.611,00
• Pajak hiburan	6.728.000,00	1.460.000,00
• Pajak reklame	13.200.000,00	25.996.000,00
• Pajak penerangan jalan	33.463.000,00	17.596.000,00
• Pajak pengambilan bahan galian golongan C	631.477.861,00	1.035.261.849,00
• Iuran KP dan ijin penimbunan mangan	281.022.139,00	2.649.148.120,00
• Ijin penimbunan BBM	1.500.000,00	1.125.000,00

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah kabupaten TTU



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
DINAS PENDAPATAN DAERAH
JL. BASUKI RACHMAT TELP. (0388) 31182
KEFAMENANU

SURAT KETERANGAN
NOMOR : Penda.070/294/I.1/2010

Yang bertanda tangn dibawah ini :

N a m a : M. M. Fernandez
 N I P : 19601017 198002 2 002
 Jabatan : Kepala Bidang Bagi Hasil Pajak
 A l a m a t : Jln. Basuki Rachmad - Kefamenanu

Dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : Lorita Naisali
 N I M : 052114048
 Fakultas : Ekonomi
 Jurusan : Akuntansi, pada Universitas Sanata Dharma - Yogyakarta

Bahwa yang bersangkutan telah melakukan penelitian di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara terhitung 11 Januari s/d 22 Pebruari 2010.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Kefamenanu, 22 Pebruari 2010
 An. Kepala Dinas Penda Kab. TTU
 Kabid. Bagi Hasil Pajak,





UNIVERSITAS SANATA DHARMA
FAKULTAS EKONOMI

Nomor : 31/Kaprodi Akt./546/XII/2009

12 Desember 2009

Lamp. : -----

Hal : Ijin Penelitian

Kepada
Yth. Kepala Dinas
Pendapatan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara
Jl. Basuki Rahmat, Kefamenanu

Dengan hormat,

Dengan ini kami informasikan bahwa mahasiswa dibawah ini :

Nama : Lorita Naisali
NIM : 052114048
Program Studi : Akuntansi
Semester : IX

berkeinginan untuk melaksanakan Penelitian dalam rangka persiapan penyusunan skripsi dengan ketentuan sebagai berikut :

Lokasi : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara
Jl. Basuki Rahmat, Kefamenanu

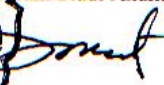
Waktu : Januari - Februari 2010

Judul Penelitian : Analisis Perkembangan Pendapatan Pajak Daerah dan Prediksi Pendapatan Pajak Daerah Sebagai Salah Satu Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara)

Sehubungan hal tersebut, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk mengijinkan mahasiswa di atas untuk melakukan Penelitian di Perusahaan yang Bapak/Ibu Pimpin

Atas perhatian dan ijin yang diberikan kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Ketua Program Studi Akuntansi



Yusuf Widya Karsana, M.Si., Akt., QIA.